

**RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN PULAU KECIL KEPULAUAN WIDI DAN
PERAIRAN SEKITARNYA
PROVINSI MALUKU UTARA 2020 - 2040**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020**



**RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN PULAU KECIL KEPULAUAN WIDI DAN
PERAIRAN SEKITARNYA
PROVINSI MALUKU UTARA
2020 – 2040**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU UTARA
2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perairan Kepulauan Widi merupakan bagian dari Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kepulauan Widi dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Suaka Pulau Kecil (SPK) berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 251/KPTS/MU Tahun 2015 dengan luas 7.690 ha. Ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah Maluku Utara No. 2 Tahun 2018, sehingga luas kawasan konservasi Kepulauan Widi di revisi menjadi 324.945,36 ha. Pencadangan Kepulauan Widi sebagai Suaka Pulau Kecil ditinjau kembali untuk penyesuaian jenis kategori kawasan serta penyederhanaan bentuk kawasan. Dari hasil peninjauan tersebut Kepulauan Widi termasuk kategori taman dengan tipe kawasan Taman Pulau Kecil (TPK) dengan luasan 315.117,92 ha

TPK Kepulauan Widi memiliki berbagai potensi dari segi ekologis, sosial budaya hingga ekonomi yang penting untuk dijaga dan dikembangkan manfaatnya. Potensi ekologis meliputi ekosistem terumbu karang dengan luasan total 1839,90 ha, ekosistem mangrove 639,77 ha (di perairan 61,69 ha dan di daratan 578,08 ha) dan ekosistem padang lamun 784,38 ha. Pada ekosistem tersebut hidup berbagai jenis organisme penting seperti ikan karang dan satwa laut kharismatik seperti lumba-lumba, hiu martil dan pari manta. Keanekaragaman hayati yang dimiliki TPK Kepulauan Widi telah menyokong kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Namun, interaksi tersebut di sisi lain telah menimbulkan dampak, seperti kerusakan habitat dan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) TPK Kepulauan Widi disusun dengan tujuan menyediakan informasi dan panduan untuk mengelola TPK Kepulauan Widi melalui penataan zonasi, dan penerapan strategi pengelolaan yang baik untuk dapat menjamin keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup dokumen ini meliputi penataan zonasi TPK Kepulauan Widi dengan luas seluas 315.117,92 ha yang tertuang dalam peta kawasan skala 1:50.000, yang sudah dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu, dokumen ini juga memuat rencana kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai bentuk implementasi dari strategi pengelolaan.

Penataan zonasi yang dimuat dalam dokumen RPZ TPK Kepulauan Widi dibagi dua zona, yaitu zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Di dalam zona pemanfaatan terbatas terdapat sub zona pariwisata dan sub zona perikanan tangkap. Masing-masing zona memiliki target konservasi atau objek yang ingin dilindungi. Target konservasi tersebut akan menentukan indikator pengelolaan kawasan dan menjadi acuan dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya hayati. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 (PP 60/2007), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 (Permen KP 17/2008), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010

(Permen KP 30/2010), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 (Permen KP 31/2020) disusun aturan berupa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tiap zona.

Dokumen RPZ TPK Kepulauan Widi juga memuat rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD). Balai ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2019. Rencana pengelolaan dan zonasi selaras dengan visi kawasan konservasi TPK Kepulauan Widi, yaitu “Terwujudnya TPK Kepulauan Widi sebagai destinasi wisata bertaraf internasional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Visi tersebut dijabarkan melalui misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk memperkuat kelembagaan pengelola, pengawasan sumber daya, melestarikan sumber daya hayati dan kearifan lokal secara berkelanjutan, membangun sarana dan prasarana, serta pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengelolaan.....	2
2. POTENSI, PERMASALAHAN DAN TARGET KONSERVASI KAWASAN.....	4
2.1 Profil Umum Kawasan.....	4
2.2 Informasi lingkungan fisik	6
2.2.1 Iklim.....	6
2.2.2 Geologi	7
2.2.3 Topografi.....	7
2.2.4 Pasang Surut air laut	8
2.2.5 Parameter Air Laut.....	10
2.3 Potensi Ekologis	11
2.3.1 Ekosistem Terumbu Karang dan Ikan Karang	12
2.3.2 Ekosistem Lamun	13
2.3.3 Ekosistem Mangrove.....	14
2.4 Potensi Sosial Budaya	14
2.5 Potensi Ekonomi	15
2.6 Permasalahan Kawasan	15
2.7 Target Konservasi Kawasan dan Ancaman terhadap Target Konservasi.....	16
3. PENATAAN ZONASI	18
3.1 Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi.....	18
3.1.1 Zona Inti	19
3.1.2 Zona Pemanfaatan Terbatas	21
3.2 Target Konservasi, Ancaman dan Indikator Monitoring di setiap Zona	23

3.3 Aturan dalam Zonasi	26
4. RENCANA PENGELOLAAN	29
4.1 Unit Pengelola	29
4.2 Rencana Jangka Panjang	29
4.2.1 Visi dan Misi	29
4.2.2 Tujuan dan sasaran pengelolaan	30
4.3 Strategi Pengelolaan	31
4.4 Rencana Jangka Menengah dan Tahunan.....	32
5. PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Titik koordinat batas TPK Kepulauan Widi.....	4
Tabel 2-2 Jumlah penduduk dan luas wilayah desa dalam TPK Kepulauan Widi	5
Tabel 2-3 Analisis curah hujan di wilayah Kepulauan Widi	7
Tabel 2-4 Total luas habitat penting dalam kawasan TPK Kepulauan Widi (Sumber: Dhannahisvara & Pingkan, 2019).....	11
Tabel 3-1 Luas masing-masing zona di TPK Kepulauan Widi	19
Tabel 3-2 Target konservasi, ancaman, dan indikator monitoring pada masing-masing zona di TPK Kepulauan Widi.....	24
Tabel 3-3 Kegiatan yang boleh, boleh dengan izin dan tidak boleh di lakukan pada tiap zona di TPK Kepulauan Widi.....	26
Tabel 4-1 Rencana kerja jangka panjang (20 tahun) TPK Kepulauan Widi	33
Tabel 4-2 Rencana kerja jangka menengah (5 tahun) TPK Kepulauan Widi.....	41
Tabel 4-3 Rencana kerja tahunan (1 tahun) TPK Kepulauan Widi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta TPK Kepulauan Widi dan batas koordinat. Angka menunjukkan titik koordinat batas kawasan	4
Gambar 2-2 Peta Pemanfaatan Eksisting di TPK Kepulauan Widi	6
Gambar 2-3 Peta arah dan kecepatan arus laut musim barat pasang menuju surut di wilayah perairan Kepulauan Widi	8
Gambar 2-4 Peta arah dan kecepatan arus laut musim Barat surut menuju pasang di wilayah perairan Kepulauan Widi	9
Gambar 2-5 Peta arah dan kecepatan arus laut musim Timur pasang menuju surut di wilayah perairan Kepulauan Widi	9
Gambar 2-6 Peta arah dan kecepatan arus laut musim Timur surut menuju pasang di wilayah perairan Kepulauan Widi	10
Gambar 2-7 Sebaran ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove di TPK Kepulauan Widi	11
Gambar 2-8 Biota laut kharismatik di Kepulauan Widi (a) hiu dan (b) penyu sisik (Muttaqin <i>et al.</i> , 2017)	12
Gambar 2-9 Rata-rata tutupan karang keras hidup di TPK Kepulauan Widi berdasarkan hasil survei tahun 2017 (Muttaqin <i>et al.</i> , 2017)	12
Gambar 2-10 Ikan karang di perairan Kepulauan Widi (Muttaqin <i>et al.</i> , 2017)	13
Gambar 2-11 Kondisi lamun di Kepualuan Widi (DKP Maluku Utara, 2017)	14
Gambar 2-12 Kondisi mangrove di Kepulauan Widi (Muttaqin <i>et al.</i> , 2017)	14
Gambar 3-1 Peta Zonasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi	18
Gambar 3-2 Peta zona inti di TPK Kepulauan Widi	21
Gambar 3-3 Peta zona pemanfaatan terbatas TPK Kepulauan Widi	22

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil (TPK) Kepulauan Widi dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun dalam rangka menyediakan panduan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan. Dalam penyusunan dokumen ini, banyak pihak yang mendukung dan memberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Gubernur Maluku Utara
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Proyek USAID *Sustainable Ecosystem Advanced* (Proyek USAID SEA) atas Pengembangan kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara
5. Kelompok Kerja (POKJA) Inisiasi pembentukan Kawasan Konservasi perairan/Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil (KKP/KKP3K) Provinsi Maluku Utara
6. *Wildlife Conservation Society* Indonesia Program (WCS-IP) atas fasilitasi dan pendampingan selama proses pengembangan Kawasan konservasi TPK Kepulauan Widi.
7. PT. LII atas dukungan, kontribusi data, ide, dan saran yang telah diberikan selama proses pengembangan Kawasan konservasi Kepulauan Widi dan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasinya.
8. Tim Penyusun dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan selama proses pengembangan KKP Kepulauan Widi dan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasinya.

Dokumen RPZ kawasan konservasi Kepulauan Widi ini akan digunakan sebagai pedoman dalam implementasi program pengelolaan kawasan konservasi semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam Kepulauan Widi dan perairan sekitarnya.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Widi membentuk gugusan yang terletak di sebelah tenggara Pulau Halmahera dan sebelah barat Kepulauan Raja Ampat (Papua Barat). Kepulauan Widi memiliki 2 (dua) gugusan pulau salah satunya adalah gugusan Pulau Widi, dan secara keseluruhan terdiri dari 83 pulau di sekitar Kepulauan Widi dan 3 pulau di sekitar pesisir Halmahera Selatan, serta terdiri dari dua atoll (Direktorat P4K Ditjen PRL KKP, 2019). Secara administrasi Kepulauan Widi berada di Desa Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Secara bio-ekologis Kepulauan Widi selain memiliki keunikan sumber daya alam baik flora dan fauna, juga terdapat berbagai jenis biota laut.

Potensi perairan Kepulauan Widi secara umum memiliki tutupan karang mulai dari cukup hingga baik yakni mulai dari 15% sampai 78% (Muttaqin *et al.*, 2017). Sedangkan komposisi genera karang keras didominasi oleh *Porites* dengan persentase sebesar 16,27%. Selain itu, genera lainnya yang cukup banyak juga ditemukan di perairan Kepulauan Widi adalah *Montipora*, *Acropora*, *Pocillopora*, *Dendrophyllia*, *Coeloseris*, *Cyphastrea*, *Pachyseris*, dan *Pavona*. Sedangkan untuk biomassa ikan karang didominasi oleh famili Acanthuridae, Caesionidae, Carchanidae dan Scarinilabridae (Muttaqin *et al.*, 2017). Selain potensi di atas, perairan Kepulauan Widi juga memiliki satwa kharismatik seperti lumba-lumba, hiu, pari manta, dugong, hiu paus dan juga ditemukan paus biru kerdil, paus sperma yang mendiami dan bermigrasi melalui perairan sekitarnya (Leadership Island of Indonesia, 2018).

Kepulauan Widi merupakan gugusan pulau yang kebanyakan tidak berpenghuni. Sejak dahulu pulau-pulau yang ada di Kepulauan Widi hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh nelayan, yaitu saat cuaca buruk dan kondisi laut sedang tidak bagus dan hanya pada Pulau Daga terdapat penduduk yang sudah menetap tinggal sekitar 15 KK. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kepulauan Widi memiliki potensi kawasan ekowisata bahari, seperti keindahan alam yang masih asli, alami dan eksotis, serta biota laut dengan keanekaragaman yang tinggi. Dengan menggunakan analisis SWOT tentang kesesuaian wisata, Kepulauan Widi memiliki nilai indeks sebesar 88,57% untuk potensi wisata bahari (Umar, 2018). Akan tetapi dengan semua itu, ancaman terhadap sumber daya yang ada di Kepulauan Widi juga masih tinggi. Salah satu ancaman yang masih marak sampai saat ini

adalah kegiatan perikanan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom, bius, serta penambangan terumbu karang maupun pasir pantai.

Dalam mewujudkan kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta melindungi dan mengelola sumber daya ikan dan ekosistem khususnya di Pulau Widi, sejak tahun 2015 pemerintah membentuk kawasan konservasi Pulau Widi. Kawasan ini dicadangkan sebagai “Suaka Pulau Kecil” melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 251/KPTS/MU tahun 2015¹. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang dicadangkan ini memiliki luas keseluruhan sebesar 7.690 ha. Adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Maluku Utara No. 2 Tahun 2018 pada pasal 21, Kepulauan Widi dialokasikan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dengan luas 324.945,36 ha². Oleh karena itu, pencadangan Kepulauan Widi sebagai Suaka Pulau Kecil ditinjau kembali untuk penyesuaian tipe kawasan serta penyederhanaan bentuk kawasan sesuai dengan ketentuan pada permen KP No 31 tahun 2020. Dari hasil peninjauan tersebut Kepulauan Widi dikategorikan sebagai Taman dengan tipe kawasan Taman Pulau Kecil (TPK) dengan luas 315.117,92 ha.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengelolaan

Tujuan dari rencana pengelolaan dan zonasi ini adalah;

- a. Menyediakan informasi dan panduan untuk mengelola TPK Kepulauan Widi.
- b. Melalui penataan zonasi dan penerapan strategi pengelolaan yang baik untuk dapat menjamin keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup dokumen rencana pengelolaan meliputi penataan zonasi kawasan konservasi Taman Pulau Kecil (TPK) seluas 315.117,92 ha yang tertuang dalam peta kawasan skala 1:50.000. Dokumen ini juga memuat tentang potensi dan ancaman yang meliputi kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta permasalahan yang terkait dengan pengelolaan jenis kawasan, penataan zonasi kawasan meliputi zonasi serta kegiatan yang boleh dan tidak

¹ Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 251/KPTS/MU Tahun 2015 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Gugusan Pulau Widi sebagai Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

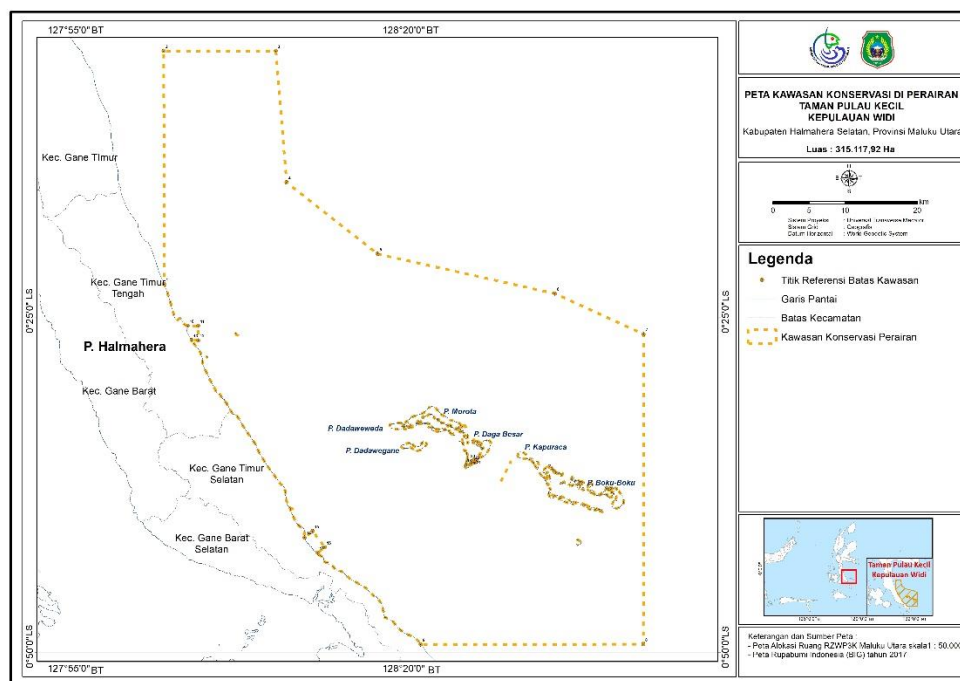
² Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2038.

boleh dilakukan beserta tujuan dan strategi pengelolaannya. Rencana pengelolaan ini juga meliputi rencana kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai bentuk implementasi dari strategi pengelolaan.

2. POTENSI, PERMASALAHAN DAN TARGET KONSERVASI KAWASAN

2.1 Profil Umum Kawasan

Secara administratif, TPK Kepulauan Widi berada di Kabupaten Halmahera Selatan dan berada di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Gane Timur Selatan dan Kecamatan Gane Timur Tengah dengan 8 (delapan) Desa. Adapun batas kawasannya seperti yang tertera dalam Gambar 2-1 dan titik koordinat pada Tabel 2-1 dibawah ini.



Gambar 2-1 Peta TPK Kepulauan Widi dan batas koordinat. Angka menunjukkan titik koordinat batas kawasan

Tabel 2-1 Titik koordinat batas TPK Kepulauan Widi

No. Titik	Koordinat		No. Titik	Koordinat	
	Lintang Selatan	Bujur Timur		Lintang Selatan	Bujur Timur
1	0° 22' 28,86"	128° 2' 6,49"	12	0° 26' 41,34"	128° 4' 39,21"
2	0° 5' 5,76"	128° 2' 4,53"	13	0° 26' 41,09"	128° 4' 9,75"
3	0° 5' 5,76"	128° 10' 27,40"	14	0° 41' 24,45"	128° 12' 36,08"
4	0° 14' 54,26"	128° 11' 15,08"	15	0° 40' 56,32"	128° 13' 12,10"
5	0° 20' 14,41"	128° 18' 3,17"	16	0° 42' 8,28"	128° 14' 6,92"
6	0° 23' 12,14"	128° 31' 17,95"	17	0° 42' 32,48"	128° 13' 34,33"
7	0° 26' 13,87"	128° 37' 55,53"	18	0° 35' 37,64"	128° 25' 13,94"
8	0° 49' 22,37"	128° 37' 53,70"	19	0° 35' 33,92"	128° 25' 17,41"
9	0° 49' 23,46"	128° 21' 16,76"	20	0° 35' 39,05"	128° 25' 26,15"
10	0° 25' 36,51"	128° 3' 52,14"	21	0° 35' 49,33"	128° 25' 18,44"
11	0° 25' 37,09"	128° 4' 39,21"	22	0° 35' 46,43"	128° 25' 12,18"

Di Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur Selatan terdapat 2 sekolah setingkat SMA, 4 sekolah setingkat SMP dan 11 sekolah setingkat SD. Dari hasil survei sosial ekonomi menunjukkan bahwa terdapat sekitar 67,50% responden merupakan lulusan SD (Lestari, 2017). Jumlah penduduk yang bersinggungan dengan TPK Kepulauan Widi adalah 4.453 jiwa. Rincian jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing Desa tercantum dalam Tabel 2-2.

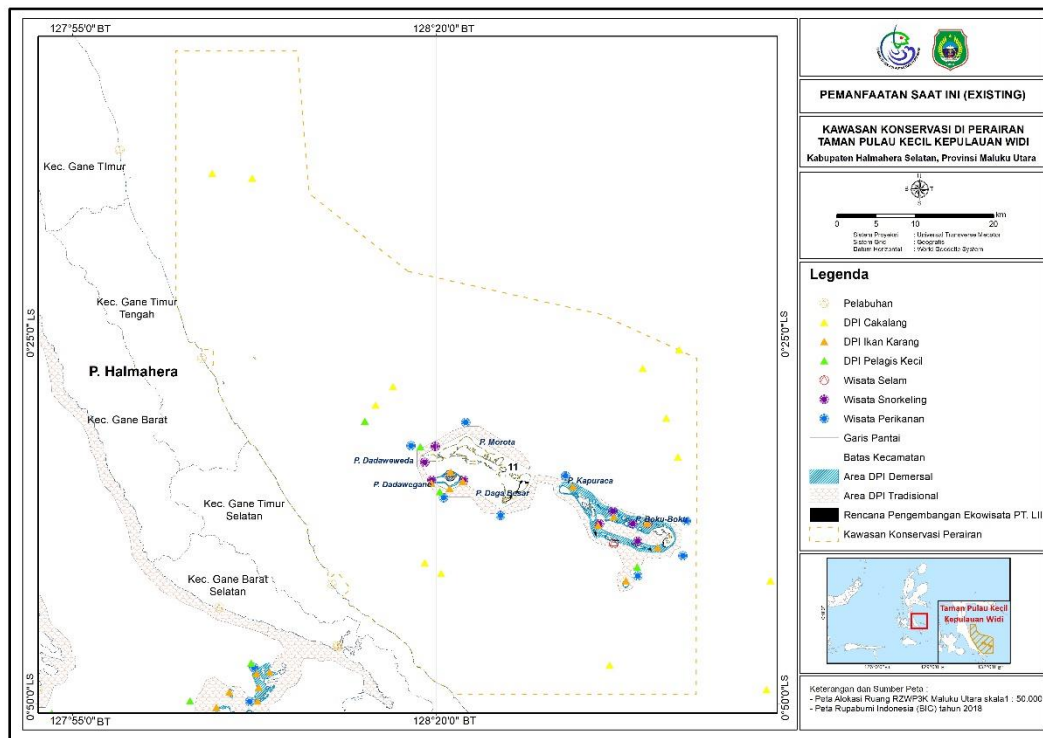
Tabel 2-2 Jumlah penduduk dan luas wilayah desa dalam TPK Kepulauan Widi

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nama Desa	Luas	Jumlah penduduk (jiwa)
Gane Timur Selatan	Gane Luar	Gane Luar	113,8	337
		Ranga ranga	49,2	1.762
		Kuwo	64,3	946
		Sawat	28,1	1.028
		Gaimu	28,8	380
Total			284,2	4.453
Gane Timur Tengah	Bisui	Bisui	22,37	1.329
		Luim	28,30	374
		Tabahidayah	71,30	641
Total			121,97	2.344

Sumber: Data BPS Kec. Gane Timur Tengah dan Kec. Gane Timur Selatan (2018)

Kepulauan Widi dapat dicapai dengan menggunakan transportasi laut. Dari kota Ternate dengan menggunakan pesawat ke Bandara Oesman Sadik di Labuha (Ibu kota Kabupaten), kemudian dilanjutkan dengan menggunakan mobil ke Pelabuhan Babang sekitar 30 menit. Setelah itu, dilanjutkan lagi dengan menggunakan kapal laut menuju ke Desa Gane Luar/Desa Gane dalam dan dilanjutkan dengan transportasi umum sepeda motor ke Desa Gane Luar. Sementara melalui darat, Kepulauan Widi dapat ditempuh selama 8 jam perjalanan mobil dari Sofifi ke Desa Matuting dan diikuiti dengan transportasi umum sepeda motor dari Desa Matuting ke Desa Bisui selama 2 jam. Sedangkan untuk sampai ke daerah kawasan konservasi Kepulauan Widi, dapat ditempuh dengan menggunakan *speed boat* (harus disewa), karena belum ada transportasi umum yang sampai ke Kepulauan Widi.

Kegiatan pemanfaatan yang ada di TPK Kepulauan Widi sebagian besar adalah kegiatan penangkapan ikan dan pariwisata (snorkeling dan menyelam) yang dapat dilihat pada Gambar 2-2.



Gambar 2-2 Peta Pemanfaatan Eksisting di TPK Kepulauan Widi

Selain itu, Kepulauan Widi mulai berkembang sebagai destinasi wisata baru. PT. Leadership Islands Indonesia (LII) merupakan badan usaha kategori Penanaman Modal Asing yang telah memiliki MoU secara eksklusif dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (No. 120.23/671/G) dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (No. 430/1047/2015) untuk melindungi, mengelola dan mengembangkan Kepulauan Widi secara bertanggung jawab, untuk dijadikan *eco-resort* dengan kegiatan wisata bahari dan konservasi. PT. LII memiliki izin untuk mengembangkan hingga 362-unit yang akan menjadi standar bintang 4 dan 5 di hingga 17 pulau. Pulau utama untuk pengembangan adalah Daga Besar, Daga Kecil, Boku Boku dan Sosara. Resort ramah lingkungan ini akan ramah lingkungan dan para tamu ke pulau-pulau Widi akan fokus pada konservasi, keberlanjutan, dan pariwisata yang bertanggung jawab.

2.2 Informasi lingkungan fisik

2.2.1 Iklim

Karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Selatan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 0 mm sampai dengan 300 mm Tabel 2-3. Selain itu Kabupaten Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh dua musim yaitu: [a] musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April, [b] musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

Tabel 2-3 Analisis curah hujan di wilayah Kepulauan Widi

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	Januari	200 – 300	Menengah
2	Februari	50 – 100	Rendah
3	Maret	100 – 150	Menengah
4	April	150 – 200	Menengah
5	Mei	50 – 100	Rendah
6	Juni	100 – 150	Menengah
7	Juli	100 – 150	Menengah
8	Agustus	0 – 20	Rendah
9	September	20 – 50	Rendah
10	Oktober	100 – 150	Menengah
11	Nopember	20 – 50	Rendah
12	Desember	100 - 150	Menengah

Sumber: (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2019)

2.2.2 Geologi

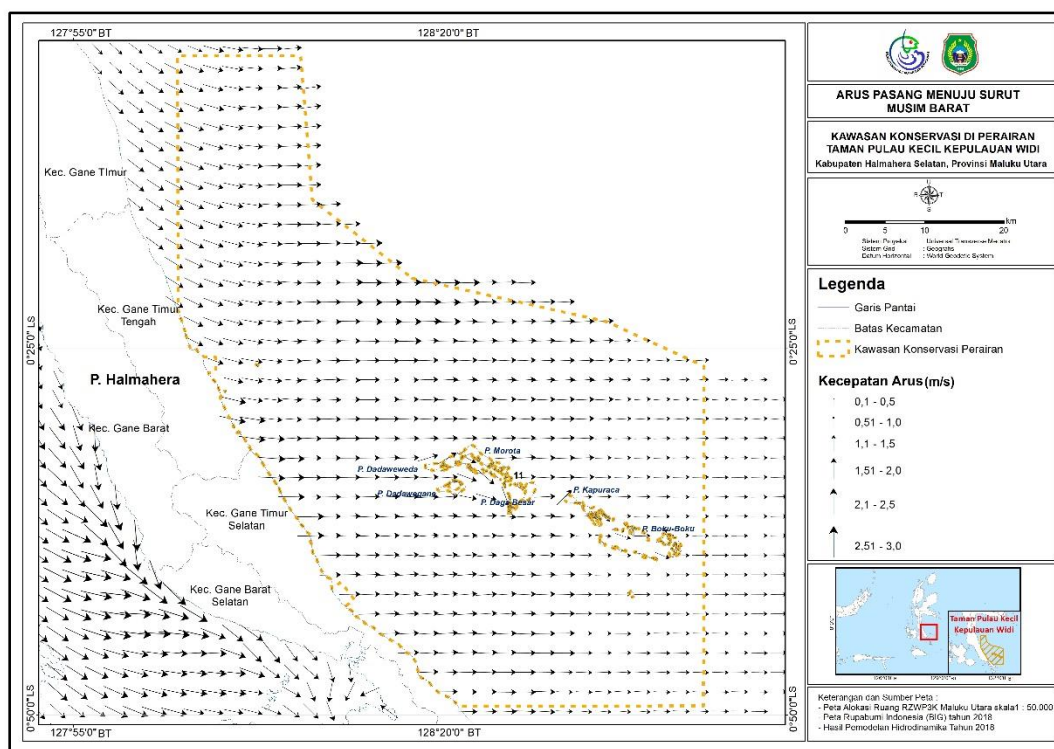
Jenis batuan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki komposisi yang sangat bervariasi yakni batuan beku, *sediment* dan *metamorf*. Berdasarkan data struktur geologi, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tersusun atas 20 jenis batuan yaitu Alluvium, batuan Gunung Api Holosen, batuan Gunung Api Neogen, batuan Gunung Api Oligo-Miosen, batuan Gunung Api Plio-Plistosen, batuan Malihan, batuan Terobosan, batuan Ultramafik, batu Gamping Terumbu, Formasi Anggai, Formasi Bacan, Formasi Fluk, Formasi Kayasa, Formasi Loleobasso, Formasi Obi, Formasi Woi, Komplek Malihan, Sedimen Klastik Miosen, Sedimen Klastik Neogen dan Terobosan Tersier (RPI2-JM Kab. Halmahera Selatan, 2014). Wilayah Kepulauan Widi memiliki satuan bentuk lahan datar dengan struktur tanah alluvial dan pasir dengan jenis tanah *Troporthens*, yaitu jenis tanah dengan kepekaan terhadap erosi tinggi. Selain itu, struktur geologi pada beberapa pulau di Kepulauan Widi tersusun dari batuan sedimen batu gamping dan terumbu (atol) (Umar, 2018).

2.2.3 Topografi

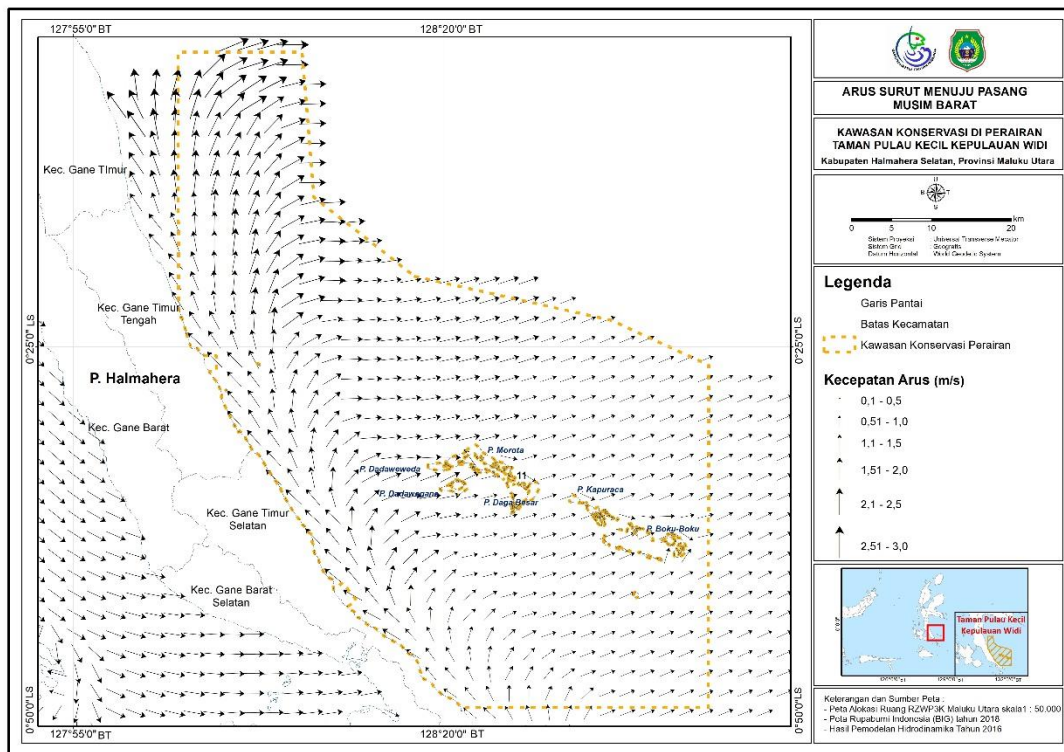
Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki daerah landai yang cukup luas. Berdasarkan kondisi fisiknya, wilayah Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur Selatan memiliki jenis kelerengan datar-landai (0-2°) (RPI2-JM Kab. Halmahera Selatan, 2014).

2.2.4 Pasang Surut air laut

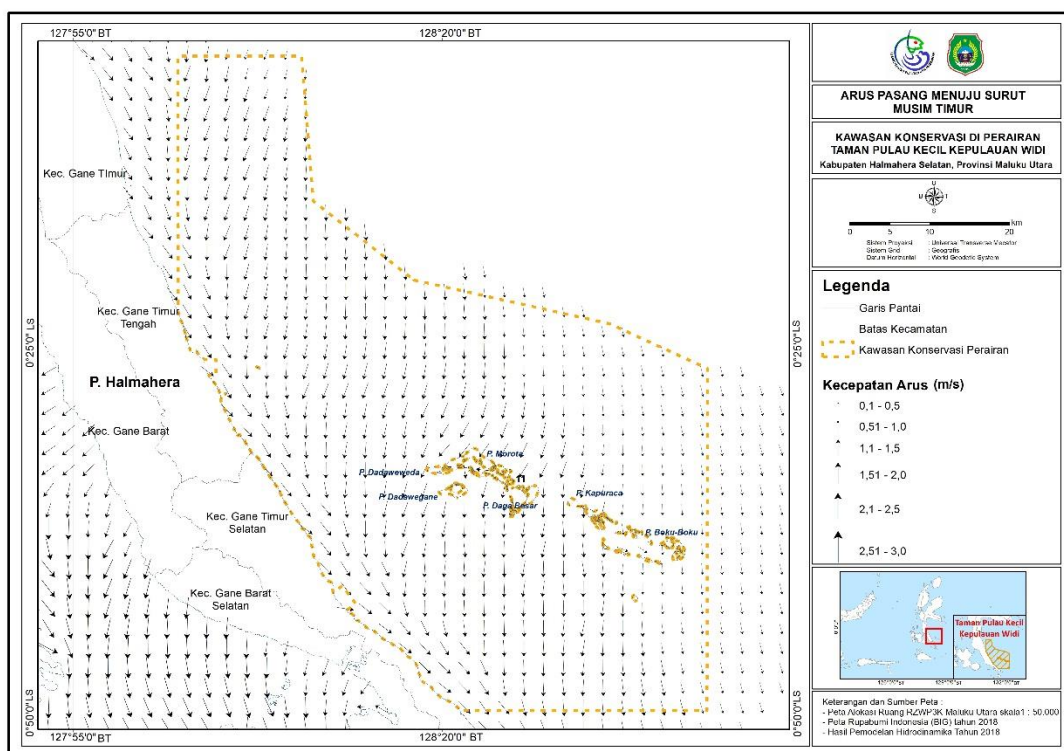
Pasang surut air laut di Kepulauan Widi terjadi pada dua musim yaitu musim Barat dan musim Timur. Berdasarkan hasil pemodelan hidrodinamika tahun 2016, pada musim Barat saat air pasang menuju surut, arus bergerak dari Barat ke arah Timur dengan kecepatan 1,1 – 3,0 m/s (Gambar 2-3). Di musim Barat pada saat air surut menuju pasang, arus bergerak dari arah Barat dan Selatan menuju Timur dan Utara dengan kecepatan 1,1 – 3,0 m/s (Gambar 2-4). Di musim Timur pada saat air pasang menuju surut, arus bergerak dari Utara ke arah Selatan dengan kecepatan 0,5 – 2,0 m/s (Gambar 2-5). Dimusim Timur saat air surut menuju pasang, arus bergerak dari Utara ke arah Selatan dengan kecepatan 0,5 – 2 m/s (Gambar 2-6).



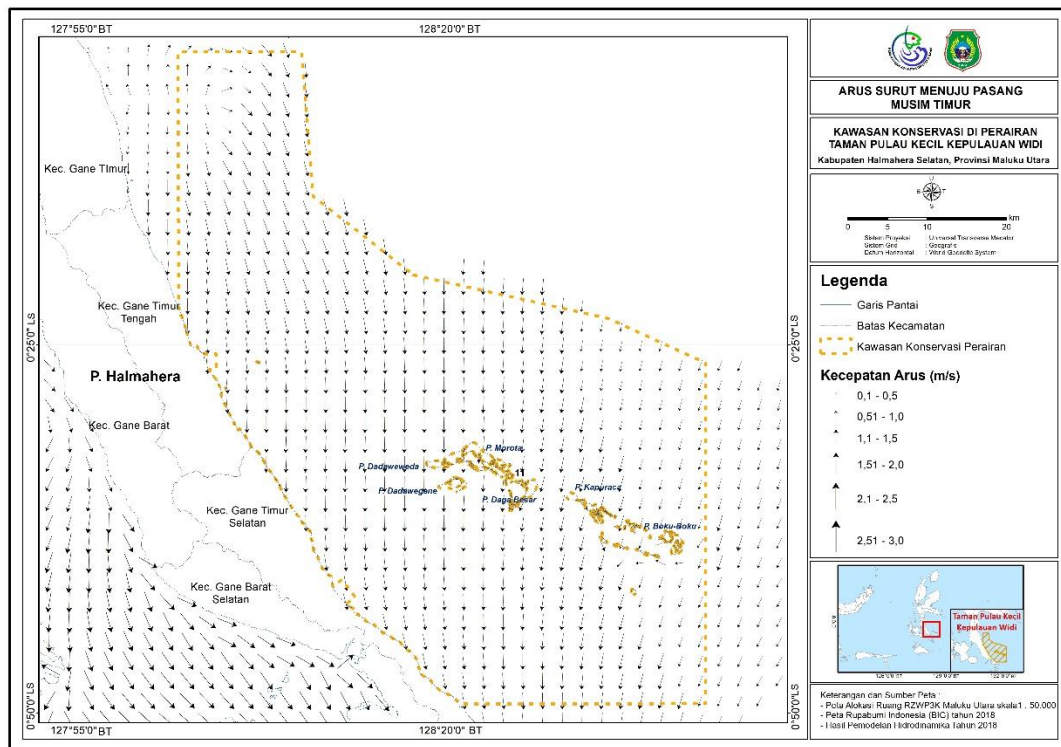
Gambar 2-3 Peta arah dan kecepatan arus laut musim barat pasang menuju surut di wilayah perairan Kepulauan Widi



Gambar 2-4 Peta arah dan kecepatan arus laut musim Barat surut menuju pasang di wilayah perairan Kepulauan Widi



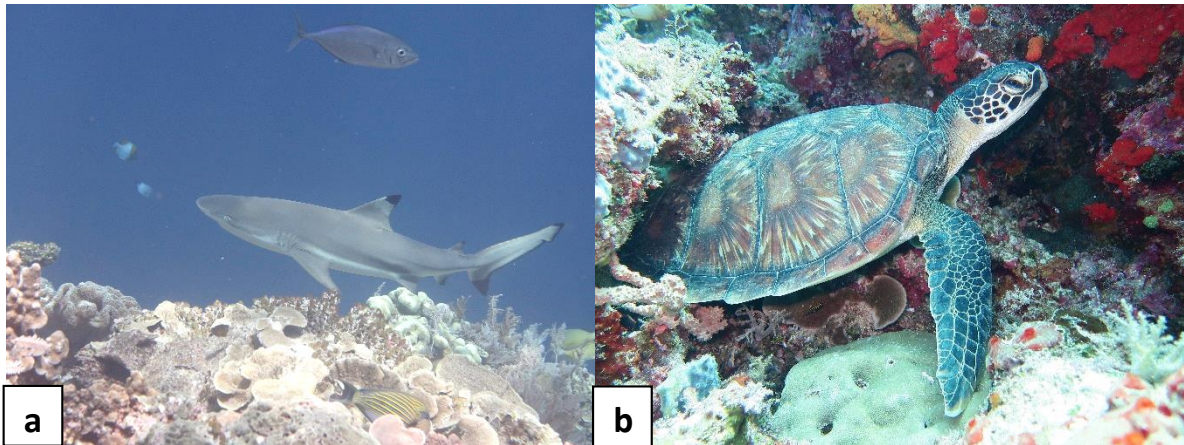
Gambar 2-5 Peta arah dan kecepatan arus laut musim Timur pasang menuju surut di wilayah perairan Kepulauan Widi



Gambar 2-6 Peta arah dan kecepatan arus laut musim Timur surut menuju pasang di wilayah perairan Kepulauan Widi

2.2.5 Parameter Air Laut

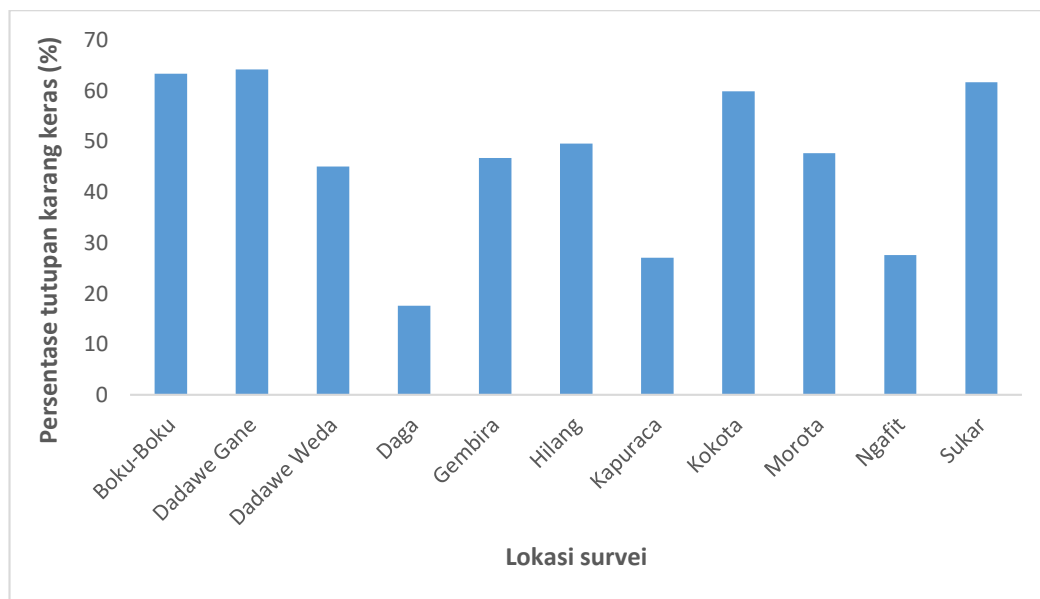
Suhu di laut merupakan salah satu parameter yang sangat berhubungan erat dengan kesuburan perairan karena suhu di perairan ini berkaitan dengan kelimpahan fitoplankton (Triadi *et al*, 2015). Kepulauan Widi memiliki suhu permukaan laut (SPL) rata-rata tiap bulan dengan kisaran 28 – 29,5 °C dengan suhu di sisi Barat Laut Kepulauan Widi lebih hangat dan semakin rendah suhunya ke arah Tenggara (DKP Malut, 2017). SPL di perairan Kepulauan Widi pada bulan Januari berkisar dinilai 28 – 30 °C kemudian sedikit menurun pada bulan Februari dengan kisaran 28 – 29 °C. Kemudian semakin meningkat di bulan Maret hingga puncaknya di bulan Mei yaitu pada kisaran 29 – 30,5 °C yaitu pada saat memasuki musim timur. SPL di perairan Kepulauan Widi mulai menurun dibulan Juni yaitu berkisar 29 – 29,5 °C. Pada bulan Januari hingga bulan Juni perairan yang memiliki suhu lebih hangat yaitu di sisi Utara Kepulauan Widi. Dibulan Juli SPL turun hingga mencapai suhu terendah di bulan September yaitu pada kisaran 27 – 28 °C dengan perairan yang lebih hangat yaitu di sisi Timur Laut hingga Timur Kepulauan Widi. Pada bulan Agustus suhu cenderung homogen di seluruh perairan Widi yaitu sebesar 28 °C. SPL kembali meningkat dibulan Oktober hingga Desember sebesar 27,5 – 30 °C. Tingkat Keasaman (pH) di perairan Kepulauan Widi yaitu 8 baik di musim Timur



Gambar 2-8 Biota laut kharismatik di Kepulauan Widi (a) hiu dan (b) penyu sisik (Muttaqin *et al.*, 2017)

2.3.1 Ekosistem Terumbu Karang dan Ikan Karang

Ekosistem terumbu karang di TPK Kepulauan Widi memiliki tutupan karang keras antara 17,5% sampai dengan 64% dengan kategori buruk yang terletak di Pulau Daga sampai dengan cukup baik yang terletak di Pulau Dadawe Gane (Gambar 2-9). Komposisi genera karang keras terdiri dari *Montipora*, *Acropora*, dan *Pocillopora*. Genera lainnya yang ditemukan yaitu *Pachyseris*, dan *Pavona*. Genus yang dominan ditemukan adalah *Porites* dengan persentase 16,27%. Tingkat pemulihan karang menunjukkan cukup baik yaitu $0,75 \text{ ind.m}^{-2} - 1,75 \text{ ind.m}^{-2}$ (Muttaqin *et al.*, 2017).



Gambar 2-9 Rata-rata tutupan karang keras hidup di TPK Kepulauan Widi berdasarkan hasil survei tahun 2017 (Muttaqin *et al.*, 2017)

Ikan karang yang terdapat di perairan Kepulauan Widi memiliki perbedaan karakter antara bagian sisi Utara dengan Selatan. Ikan karnivora besar seperti hiu dan kakap lebih banyak ditemukan di bagian Selatan. Sedangkan untuk bagian sisi Utara ikan karang dominan dari kelompok mayor (damselfish, anthias dll). Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada sisi Utara memiliki gelombang yang cukup besar, tutupan karang didominasi oleh karang keras, dan kontur dasar perairan yang landai sehingga banyak ruang untuk bersembunyi dan tinggal menetap. Berbeda dengan wilayah bagian Selatan yang memiliki perairan dangkal cenderung landai serta banyak karang lunak dan pada perairan dalamnya cenderung terjal (Muttaqin *et al.*, 2017).



Gambar 2-10 Ikan karang di perairan Kepulauan Widi (Muttaqin *et al.*, 2017).

Kelimpahan ikan karang di TPK Kepulauan Widi relatif masih baik. Rata-rata kelimpahan ikan karang adalah 33.549 ind/ha dan rata-rata biomassa ikan karang adalah 1.873,76 ind/ha (Muttaqin *et al.*, 2017). Komposisi biomassa ikan target didominasi oleh Acanthuridae, Caesionidae, Carcharinidae dan Scarini Labridae. Selain itu biomassa hiu juga cukup tinggi yang dibuktikan dengan ditemukannya pada 11 (sebelas) lokasi survey (Muttaqin *et al.*, 2017).

2.3.2 Ekosistem Lamun

Penyebaran lamun di wilayah pesisir TPK Kepulauan Widi tidak merata. Hal ini dikarenakan gugusan Pulau Widi berada pada daerah teluk atau terlindung, sehingga sebagian wilayah perairan keruh dan menghambat proses fotosintesis lamun. Hasil survei menunjukkan Kepulauan Widi memiliki 8 (delapan) jenis lamun, yaitu *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Syringidium isoetifolium*, *Holodule uninervis*, *Halophila minor*, *Halophila ovalis*, *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*. Keanekaragaman jenis lamun ini tergolong sedang, artinya

tidak ada jenis yang mendominasi serta penyebaran jenisnya lebih merata (DKP Maluku Utara, 2017).



Gambar 2-11 Kondisi lamun di Kepulauan Widi (DKP Maluku Utara, 2017)

2.3.3 Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove di TPK Kepulauan Widi penyebarannya tidak merata pada setiap jenis. Beberapa jenis mangrove yang ditemukan antara lain *Rhizophora apiculate*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Ceriops tagal*, *Sonneratia alba*, *Xylocarpus granatum* dan *Lumnitzera littorea*. Dari semua jenis tersebut, kelompok *Rhizophora* mendominasi karena berkaitan dengan tipe substrat yaitu pasir berlumpur (DKP Maluku Utara, 2017).



Gambar 2-12 Kondisi mangrove di Kepulauan Widi (Muttaqin *et al.*, 2017)

2.4 Potensi Sosial Budaya

Secara sosial dan budaya, penduduk Desa Gane Luar dan desa di sekitarnya terdiri dari beberapa suku, seperti Gane, Tobelo, Makian dan Buton. Beberapa Desa sudah berdiri sejak lama misalnya Desa Gaimu, Ranga-ranga dan Gane Luar. Salah satu warisan budaya di

Kepulauan Widi yang masih dilakukan hingga saat ini adalah membuat “tumpeng” untuk kapal baru atau yang sudah dipugar sebelum berlayar ke laut (Lestari, 2017).

2.5 Potensi Ekonomi

Penduduk di Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur Selatan didominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani kebun, nelayan, tukang dan pedagang. Perkebunan masyarakat Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur Selatan dominan berupa kelapa, cengkeh, pala, coklat dan lain-lain (BPS Gane Timur Tengah, 2018; BPS Gane Timur Selatan, 2018). Di Kepulauan Widi sendiri sudah terdapat pemukiman yang tinggal menetap di Pulau Daga berjumlah sekitar 15 KK.

Kepulauan Widi merupakan salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal. Wisatawan yang sudah pernah sampai di Kepulauan Widi menjuluki tempat ini sebagai Maladewa-nya Indonesia. Gugusan Pulau yang eksotik dan memiliki potensi wisata menarik seperti air yang jernih, pantai dengan pasir putih dan mangrove yang masih alami. Potensi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Widi nantinya jika telah dikelola dengan baik.

2.6 Permasalahan Kawasan

a. Kelembagaan

Secara formal sudah ada lembaga pengelola kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perikanan dan Kelautan, yang disebut Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP). Kemudian peraturan ini direvisi menjadi Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang perubahan nomenklatur menjadi UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Balai KKPD) Maluku Utara. Selain Nomenklatur yang mengalami perubahan, struktur organisasi juga mengalami perubahan.

Secara hierarki, Balai KKPD Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dua Seksi, serta Koordinator Wilayah. Namun dengan perubahan nomenklatur UPTD, dua seksi yang semula terdiri dari seksi (1) konservasi sumberdaya kelautan dan (2) pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, kini berubah menjadi seksi (1) pengelolaan kawasan konservasi dan (2) pengembangan kawasan konservasi. Koordinator Wilayah dalam struktur organisasi Balai

KKPD diproyeksikan untuk mengelola tiga kawasan konservasi. Pada TPK Kepulauan Widi akan berada di bawah Koordinator Wilayah 3 yaitu Wilayah Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.

Sampai peraturan gubernur tersebut diterbitkan tahun 2019, UPTD Balai KKPD Maluku Utara sudah memiliki empat orang personil sebagai pelaksana harian dan penanggung jawab, sedangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengelolaan kawasan konservasi belum ada. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan yang perlu segera diatasi.

b. Pemanfaatan Sumber daya Alam

Masalah yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam adalah praktik penangkapan ikan secara merusak atau *Destructive Fishing (DF)*, seperti penggunaan bom dan sianida. Berdasarkan informasi masyarakat, aktivitas ini masih sering terjadi dan pelakunya adalah nelayan yang berasal dari luar Kepulauan Widi. Selain masalah DF, juga masih ditemukan adanya penangkapan penyu dan telur penyu oleh masyarakat untuk dikonsumsi, perburuan hiu, ikan pari untuk diambil siripnya dan dijual serta pengambilan kima untuk dikonsumsi dan dijual.

2.7 Target Konservasi Kawasan dan Ancaman terhadap Target Konservasi

Selain memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, TPK Kepulauan Widi juga memiliki ancaman yang cukup besar dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi habitat dan/atau jenis biota yang akan dijadikan target konservasi. Tujuannya adalah agar lembaga pengelola dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengelola TPK Kepulauan Widi. Target konservasi yang akan dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaan kawasan adalah:

1. Ekosistem terumbu karang
2. Ekosistem lamun
3. Ekosistem mangrove
4. Pari manta
5. Lumba lumba
6. Hiu
7. Ikan karang.
8. Paus

Beberapa ancaman terhadap target konservasi di TPK Kepulauan Widi dan perairan sekitarnya telah diidentifikasi melalui berbagai pertemuan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, baik di lapangan maupun dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Ancaman-ancaman tersebut meliputi:

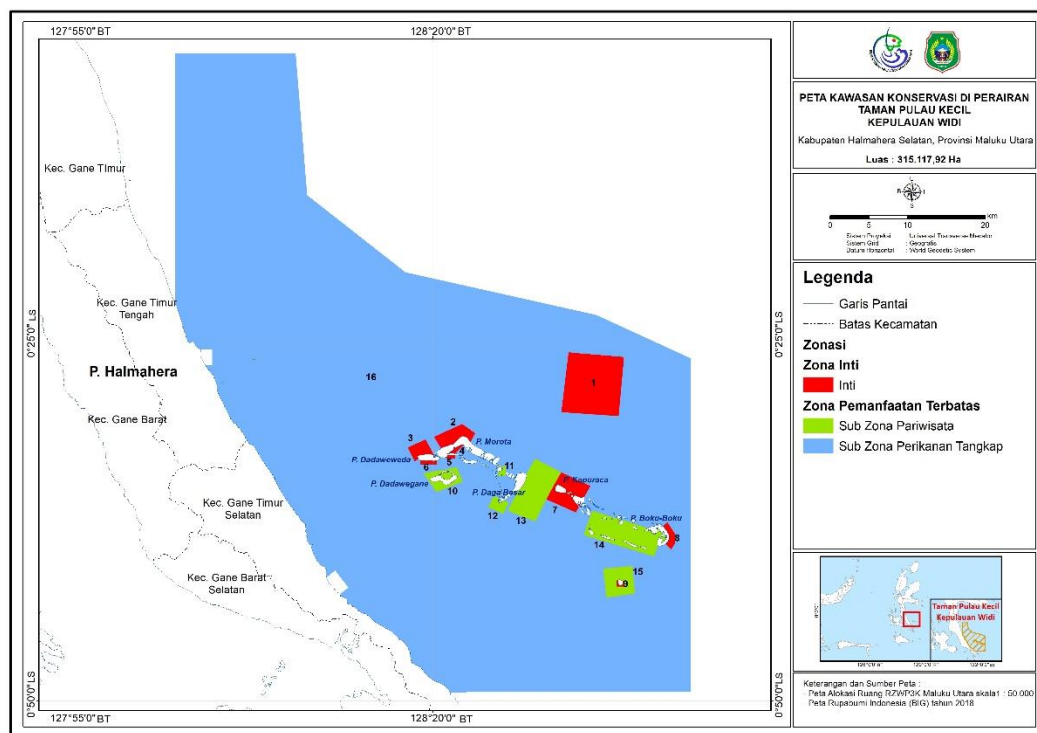
1. Pembuangan jangkar perahu di daerah terumbu karang;
2. Penangkapan biota *Endangered Threatened Protected* (ETP) baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh nelayan;
3. Penggunaan bom dan sianida; dan
4. Penangkapan ikan secara *illegal*.

3. PENATAAN ZONASI

3.1 Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi

Zonasi adalah pengalokasian ruang dalam suatu kawasan yang mengatur tentang peruntukkan suatu wilayah untuk berbagai macam kegiatan. Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMen KP) nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, zonasi terdiri dari tiga zona yaitu (1) zona inti, (2) zona pemanfaatan terbatas, dan (3) zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Zonasi di dalam kawasan TPK Kepulauan Widi diperoleh melalui hasil konsultasi publik dengan masyarakat nelayan dan instansi Pemerintahan Daerah terkait, pertemuan pokja, serta survey lapangan. TPK Kepulauan Widi memiliki dua zona yaitu 1) Zona inti; 2) Zona pemanfaatan terbatas (sub zona pariwisata dan sub zona perikanan tangkap) dapat dilihat pada Gambar 3-1.



Gambar 3-1 Peta Zonasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi

Luas masing-masing zona TPK Kepulauan Widi dapat dilihat pada Tabel 3-1. Sedangkan peta, batas dan titik koordinat masing-masing zona terdapat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Untuk luasan masing-masing habitat penting yang dilindungi di dalam zona terdapat pada lampiran 4.

Tabel 3-1 Luas masing-masing zona di TPK Kepulauan Widi

Zona	Sub zona	Kode	Luas (ha)	Total Luas (ha)	Persentase (%)
Inti	-	1	5563,05	8.751,78	2,78
		2	794,38		
		3	461,35		
		4	78,49		
		5	45,01		
		6	101,41		
		7	1408,53		
		8	256,52		
		9	43,04		
Pemanfaatan terbatas	Pariwisata	10	706,85	8.021,49	2,55
		11	99,85		
		12	330,16		
		13	2714,19		
		14	2892,71		
		15	1277,74		
	Perikanan tangkap	16	298344,64	298.343,84	94,68
Total Luasan				315.117,92	100,00

(Sumber: Dhanahisvara & Pingkan, 2019)

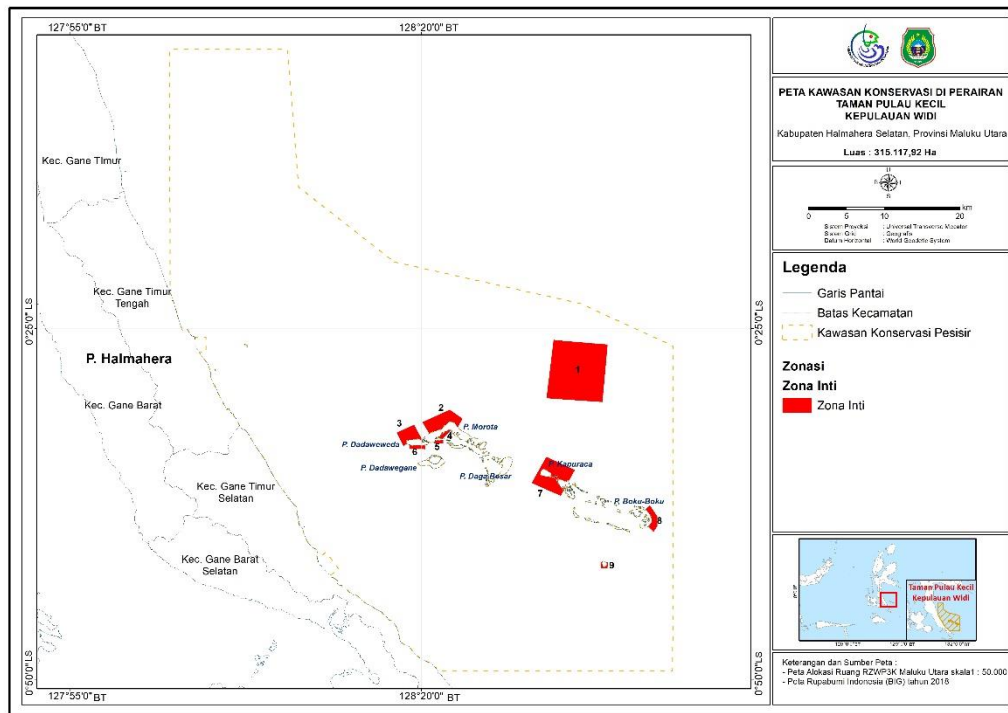
3.1.1 Zona Inti

Zona inti TPK Kepulauan Widi memiliki luas sebesar 8.751,78 ha atau 2,78% dari total luas kawasan. Zona ini sudah memiliki kriteria yang ditentukan oleh pemerintah³ dan mempunyai nilai konservasi tinggi, sangat rentan dan tidak diijinkan melakukan kegiatan apapun kecuali untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan. Zona inti di TPK Kepulauan Widi memiliki potensi ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove, ikan karang, dan gunung bawah laut.

³ Sesuai dengan pasal 33 PerMen KP 17 tahun 2008, kriteria suatu wilayah untuk dapat ditentukan sebagai zona inti adalah merupakan tempat memijah, bertelur, membesarkan ataupun mencari makan biota perairan. Selain itu bisa juga merupakan salah satu ekosistem pulau-pulau kecil yang masih utuh dan tidak terganggu atau memiliki keunikan dan rentan terhadap perubahan.

Terdapat sembilan zona inti di kawasan TPK Kepulauan Widi (Gambar 3-2). Zona inti ID 1 merupakan gunung bawah laut, yang merupakan zona inti terbesar (5.563,05 ha) di antara zona inti lainnya. ID 2 yang terletak di sisi utara Pulau Morota memiliki kondisi tutupan karang yang sangat baik (61,67%) dengan tingkat pemulihan karang yang tinggi (1,31 ind.m⁻²), serta memiliki biomassa ikan karang yang cukup tinggi (2.460 kg/ha) (Muttaqin *et al.*, 2017). Wilayah ini sangat cocok dijadikan sebagai zona inti karena akan memberikan kesempatan terumbu karang untuk berkembang dan pulih secara alami, sehingga berdampak positif terhadap ketersediaan sumber daya ikan di masa depan. Pada pulau ini juga tidak ada masyarakat yang tinggal, dan berdasarkan informasi dari pemerintah daerah bahwa belum ada rencana pembangunan infrastruktur wisata kedepan nya.

Zona inti ID 3 terletak di sisi Utara Pulau Dadaweweda, merupakan wilayah yang memiliki tutupan karang keras dan biomassa ikan karang yang cukup tinggi (2.545 kg/ha). Selain itu terdapat lamun yang masih memiliki kondisi yang cukup baik. Area batas wilayah zona ini berada pada garis pantai, dengan tipe pantai landau dan berpasir. Wilayah sangat jauh dari pemukiman yang berada di daratan utama Halmahera Selatan. Zona inti ID 4 dan ID 5 terletak pada sisi Selatan Pulau Morota serta ID 6 yang terletak di Selatan Pulau Dadaweweda memiliki kondisi mangrove dan tutupan karang yang cukup tinggi. Dijadikannya lokasi ini sebagai zona inti diharapkan menjadi habitat pemijahan dan pembesaran ikan. Pada ketiga wilayah zona inti ini sangat jauh dari pemukiman, dan wilayah pulau ini tidak berpenghuni, serta berdasarkan informasi dari pemerintah daerah bahwa belum ada rencana pembangunan infrastruktur wisata kedepan nya.



Gambar 3-2 Peta zona inti di TPK Kepulauan Widi

Zona inti ID 7 terletak di Kapuraca memiliki tutupan karang keras yang cukup rendah, akan tetapi memiliki tingkat pemulihan karang yang tinggi dan biomassa ikan karang yang cukup tinggi (2.225 kg/ha) (Muttaqin *et al.*, 2017). Pulau ini tidak berpenghuni serta belum ada rencana pengembangan infrastruktur wisata untuk beberapa tahun kedepan. Selain terumbu karang yang menjadi target konservasi, pada wilayah ini terdapat juga lamun yang cukup luas serta hiu yang merupakan spesies kharismatik. Zona inti ID yang terletak di Pulau Gembira memiliki tutupan karang dan tingkat pemulihan karang yang tinggi. Sedangkan zona inti ID 9 yang terletak di Pulau Ngafit memiliki tutupan karang yang cukup rendah (27,5%), dengan tingkat pemulihan karang yang cukup tinggi (1,27 ind.m⁻²) dan biomassa ikan karang cukup tinggi (2.487 kg/ha) (Muttaqin *et al.*, 2017).

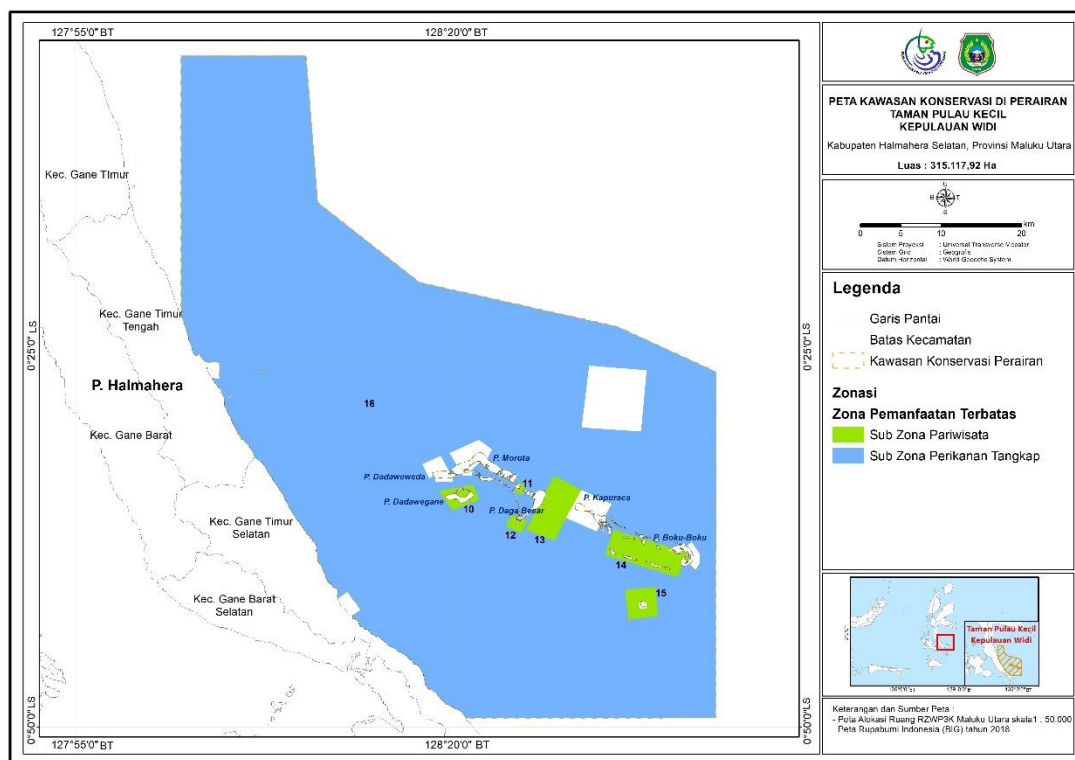
3.1.2 Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona pemanfaatan terbatas di TPK Kepulauan Widi memiliki luasan 306.366,14 ha atau setara dengan 97,2%. Terdapat enam sub zona pariwisata di TPK Kepulauan Widi yaitu nomor 10 yang terletak di Pulau Dadawegane memiliki tutupan karang yang cukup tinggi. Selain itu juga terdapat lamun dan mangrove. Wilayah ini diperuntukkan bagi wisata bahari seperti snorkeling dan menyelam. Sub zona pariwisata nomor 11 yang terletak di antara Pulau

Morota dengan Pulau Daga Besar memiliki potensi karang dan mangrove yang cukup baik. Sama dengan pulau Dadawegane, wilayah ini juga sangat cocok untuk kegiatan wisata bahari seperti snorkeling dan menyelam.

Sub zona pariwisata nomor 12 memiliki tutupan karang yang cukup rendah dibandingkan dengan titik survei lainnya (17,5%), akan tetapi tingkat pemulihan karang dan biomassa ikan pada wilayah ini cukup tinggi yaitu 2.444,4 kg/ha (Muttaqin *et al.*, 2017). Wilayah ini juga salah satu *spot* menyelam yang sangat baik, karena dapat dijumpai gerombolan hiu martil. Sedangkan Nomor 13 memiliki potensi terumbu karang dan spesies laut kharismatik yang dapat menarik wisatawan. Pada wilayah ini potensi wisata yaitu snorkeling dan menyelam.

Sub zona pariwisata nomor 14 dan 15 yang terletak di Pulau Boku-boku dan Pulau Ngafit memiliki tutupan karang yang cukup tinggi yakni 27,5% dengan tingkat pemulihan karang yang cukup tinggi (1,277 ind.m⁻²). Biomassa ikan pada kedua wilayah ini juga cukup tinggi yaitu 1.450 kg/ha dan 2.487 kg/ha (Muttaqin *et al.*, 2017). Kedua wilayah ini merupakan daerah atol yang memiliki hamparan pasir putih yang sangat luas. Spesies laut kharismatik juga masih banyak ditemukan di wilayah ini, seperti hiu, lumba lumba dan pari manta Gambar 3-3.



Gambar 3-3 Peta zona pemanfaatan terbatas TPK Kepulauan Widi

Sub zona perikanan tangkap merupakan area yang terluas. Sub zona ini memiliki luas 298.344,64 ha atau 94,68% dari total luas Kawasan Konservasi TPK Kepulauan Widi (Gambar 3-3). Sub zona ini memiliki nilai konservasi untuk tujuan pemanfaatan perikanan berkelanjutan. Berberapa kegiatan yang boleh dilakukan oleh masyarakat seperti penangkapan ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan, dan penggunaan kapal dengan kapasitas maksimum 10 *Gross Ton* (GT). Potensi perikanan di zona ini berupa ikan demersal seperti kakap, kerapu, baronang, dan ikan pelagis seperti layang, cakalang dan julung-julung.

3.2 Target Konservasi, Ancaman dan Indikator Monitoring di setiap Zona

Target konservasi, ancaman dan indikator monitoring merupakan prasyarat penting dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi adalah mengidentifikasi dan menentukan prioritas/target konservasi. Keberadaan target konservasi harus dapat diidentifikasi untuk masing-masing zonasi agar bisa menjadi indikator pengelolaan kawasan. Target konservasi juga dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya alam.

TPK Kepulauan Widi memiliki target dari aspek sumberdaya karena setiap habitat ataupun biota memiliki kerentanan terhadap ancaman dari kegiatan manusia sehingga mengganggu populasi ataupun fungsi ekologisnya. Tekanan atau ancaman terhadap target konservasi pada umumnya memiliki kesamaan, misalnya ancaman bagi habitat terumbu karang dapat pula menjadi ancaman bagi populasi ikan. Ancaman yang sama bisa menghasilkan dampak yang sama maupun berbeda pada masing-masing target konservasi. Ancaman ini yang harus dapat diantisipasi ataupun dicarikan solusinya melalui strategi pengelolaan yang sesuai. Indikator monitoring digunakan untuk bisa mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan dapat efektif mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian target konservasi. Target konservasi untuk masing-masing zonasi secara detail beserta ancaman dan indikator monitoringnya dapat dilihat pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Target konservasi, ancaman, dan indikator monitoring pada masing-masing zona di TPK Kepulauan Widi

Zonasi	Target Konservasi	Ancaman	Indikator Monitoring
Inti	1. Terumbu karang 2. Lamun 3. Mangrove 4. Hiu 5. Pari manta 6. Ikan karang 7. Lumba lumba	• Nelayan membuang jangkar di area terumbu karang • Penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap merusak seperti: bom; jaring tidak selektif, potas/racun. • Penambangan pasir • Sampah • Penebangan mangrove untuk kayu bakar dan bangunan. • Penangkapan biota laut yang dilindungi secara sengaja maupun tidak disengaja oleh nelayan	• Persentase tutupan karang • Jumlah kelimpahan biomassa ikan karang, dan kakap-kerapu • Jumlah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan • Jumlah laporan kejadian penggunaan alat tangkap merusak⁴ • Kegiatan pengawasan kawasan • Banyaknya sampah di zona inti • Persentase tutupan lamun • Persentase kerapatan lamun • Persentase kerapatan mangrove • Jumlah laporan kejadian biota laut yang dilindungi tertangkap oleh nelayan
Pemanfaatan terbatas (<i>Sub zona pariwisata</i>)	1. Terumbu karang 2. Mangrove 3. Migrasi paus 4. Hiu 5. Pari manta 6. Ikan karang 7. Lumba lumba	• Operator pariwisata membuang jangkar di area terumbu karang. • Wisatawan yang menginjak karang. • Penangkapan ikan ilegal di sub zona pariwisata alam perairan dengan menggunakan alat	• Jumlah kapal pariwisata yang masuk ke dalam kawasan • Jumlah pengunjung pariwisata • Persentase tutupan dan rekrutmen karang • Jumlah sampah di sub zona pariwisata alam perairan • Kelimpahan bomassa ikan karang

⁴ Laporan POKMASWAS

Zonasi	Target Konservasi	Ancaman	Indikator Monitoring
		tangkap merusak seperti: bom; jaring tidak selektif, potas/racun. • Sampah dan limbah dari kapal pariwisata • Pengambilan karang dan biota laut lainnya sebagai souvenir • Tabrakan kapal terhadap biota laut kharismatik. • Penangkapan biota laut yang dilindungi secara sengaja maupun tidak sengaja oleh nelayan	• Jumlah operator pariwisata yang menerapkan SOP pariwisata • Kegiatan pengawasan kawasan
Pemanfaatan terbatas (<i>sub zona perikanan tangkap</i>)	1. Ikan karang 2. Ikan pelagis	• Penangkapan ikan secara berlebih • Penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap merusak seperti: bom; jaring tidak selektif, potas/racun • Sampah	• Kelimpahan biomassa ikan karang dan ikan pelagis

3.3 Aturan dalam Zonasi

Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam Kawasan Konservasi TPK Kepulauan Widi diatur sesuai dengan peruntukkan masing-masing zona, untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut. Semua kegiatan yang boleh, boleh dengan izin dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap zona merujuk pada PerMen KP 30/2010⁵, PerMen KP 47/2016⁶ dan PerMen KP 31/2020⁷. Detail kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3-3.

Tabel 3-3 Kegiatan yang boleh, boleh dengan izin dan tidak boleh dilakukan pada tiap zona di TPK Kepulauan Widi

No.	Kegiatan	Zona inti	Zona pemanfaatan terbatas	
			Sub zona pariwisata	Sub zona perikanan tangkap
A. Pendidikan, Penelitian dan Rehabilitasi				
1	Penelitian ekstraktif	X	√	√
2	Penelitian non ekstraktif	Izin	√	√
3	Pendidikan	X	√	√
4	Rehabilitasi terumbu karang	X	√	√
5	Transplantasi lamun	X	√	√
6	Rehabilitasi mangrove	X	√	√
B. Pemanfaatan sumber daya alam dan budidaya				
7	Penangkapan ikan:			
	a. Pancing dasar	X	X	√
	b. Pancing ulur	X	X	√
	c. Rawai	X	X	X
	d. Panah	X	X	X
	e. Bagan tancap dan perahu	X	X	√
	f. Bom, bius	X	X	X
	g. Rumpon	X	X	X

⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

No.	Kegiatan	Zona inti	Zona pemanfaatan terbatas	
			Sub zona pariwisata	Sub zona perikanan tangkap
	h. Menyelam dengan kompressor	X	X	X
8	Penangkapan ikan dengan kapal maksimum 10 GT dan sudah terdaftar di DKP	X	X	√
9	Penambangan karang	X	X	X
10	Penebangan mangrove	X	X	X
11	Penambangan pasir	X	X	X
12	Menangkap, mengambil, dan melukai biota yang dilindungi (penyu, lumba lumba, dan hiu)	X	X	X
13	Budidaya rumput laut	X	X	√
14	Budidaya keramba jaring apung	X	X	√
15	Budidaya ikan kerapu	X	X	√
C. Pariwisata				
16	Wisata melihat spesies tertentu (Lumba lumba, Pari manta, hiu, penyu dll)	X	Izin	√
17	Aktivitas kapal wisata (<i>glass bottom boat</i> ; transportasi)	X	Izin	√
18	Olahraga	X	X	X
19	Rekreasi pantai	X	√	√
20	Wisata selam	X	Izin	Izin
21	Wisata snorkeling	X	Izin	Izin
22	Wisata jet ski	X	X	X
23	Wisata mangrove	X	√	√
24	Wisata selancar	X	√	√
25	Wisata dayung	X	√	√
26	<i>Banana boat</i>	X	X	Izin
27	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersil	X	√	√
28	Pembangunan sarana wisata (<i>resort, home stay</i>)	X	Izin	X
29	Pembangunan tracking mangrove	X	Izin	X
30	Pembangunan sarana atau pos wisata	X	Izin	Izin
31	Pembangunan mercusuar	X	Izin	Izin
32	Pembangunan dermaga/ <i>jetty</i>	X	Izin	Izin
33	Pembangunan talud/pemecah ombak	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona inti	Zona pemanfaatan terbatas	
			Sub zona pariwisata	Sub zona perikanan tangkap
D. Pelayaran, pengelolaan dan pengawasan KKP3K				
34	Berlabuh untuk kapal kapasitas diatas 10 GT	X	√	√
35	Berlayar melintas untuk kapal berukuran dibawah atau sama dengan 10 GT	√	√	√
36	Membuang jangkar	X	X	X
37	Jalur pelayaran	X	X	√
38	Jalur transportasi kapal reguler masyarakat	X	√	√
39	Tambatan perahu (<i>mooring bouy</i>)	X	√	√
40	Patroli pengawasan	Izin	√	√
41	Membuang limbah budidaya ke perairan langsung	X	X	X

Ket X: tidak diperbolehkan, √: diperbolehkan dan Izin: perlu izin ke unit pengelola

4. RENCANA PENGELOLAAN

4.1 Unit Pengelola

Pengelolaan TPK Kepulauan Widi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Balai KKPD) Maluku Utara. Unit pengelola ini tidak hanya mengelola TPK Kepulauan Widi tapi juga lima kawasan konservasi lainnya yang ada di Maluku Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai KKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 37 tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pasal 3 yang menyebutkan bahwa cabang dinas hanya melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program. Balai KKPD akan melaksanakan semua kegiatan yang tercantum pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) ini, dalam rangka mencapai pengelolaan yang efektif dan berkeadilan.

4.2 Rencana Jangka Panjang

Rencana Jangka Panjang merupakan arah kebijakan pengelolaan TPK Kepulauan Widi. Yang memuat tentang visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi pengelolaan yang akan menjadi panduan bagi UPTD Balai KKPD. Rencana Jangka Panjang ini berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali. Rencana Jangka Panjang terdiri dari:

4.2.1 Visi dan Misi

Visi TPK Kepulauan Widi adalah “Terwujudnya TPK Kepulauan Widi sebagai destinasi wisata bertaraf internasional untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan melakukan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya perairan melalui kegiatan perikanan kepariwisataan.
4. Membangun sarana dan prasarana yang ramah lingkungan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perairan.

4.2.2 Tujuan dan sasaran pengelolaan

4.2.2.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan TPK Kepulauan Widi dibedakan menjadi tiga tujuan utama, yaitu:

A. Tujuan tata kelola kelembagaan

1. Terwujudnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya perairan.
2. Terjalinnnya kemitraan dalam pengelolaan sumber daya perairan.
3. Tersedianya pendanaan dalam mendukung pengelolaan sumber daya perairan dan terlaksananya program pengembangan ekowisata.

B. Tujuan sumber daya hayati

1. Terbangunnya kesadartahuan masyarakat dalam pegelolaan sumber daya perairan.
2. Terbangunnya upaya aktif dalam mendukung pelestarian terumbu karang, lamun, dan biota laut.
3. Tercapainya pengelolaan yang efektif melalui perlindungan ekosistem, habitat, spesies dan sumber daya yang penting.
4. Terlaksanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktifitas *destructive fishing* dan *illegal fishing*.

C. Tujuan sosial ekonomi dan budaya

1. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kawasan konservasi.

4.2.2.2 Sasaran Pengelolaan

A. Sasaran pengelolaan tata kelola kelembagaan

1. Tersedianya sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan berkelanjutan untuk unit pengelola, pemanfaatan, pengawasan sumber daya, dan kegiatan ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Terjalainnya kemitraan dalam pengelolaan kawasan dalam waktu lima tahun setelah penetapan.

B. Sasaran sumber daya hayati

1. Pada tahun 2025, persentase tutupan karang meningkat sebesar 2% dari data dasar tahun 2017.

2. Pada tahun 2025, kerapatan mangrove minimal sama atau lebih tinggi dari data dasar tahun 2017.
3. Pada tahun 2025, tutupan padang lamun minimal sama atau lebih tinggi dari data dasar tahun 2017.
4. Pada tahun 2025, kelimpahan biomassa ikan karang meningkat sebesar 5% dari data dasar tahun 2017.
5. Pada akhir tahun 2040, jumlah spesies kharismatik meningkat sebesar 2% dari data dasar tahun 2017.

C. Sasaran sosial ekonomi budaya

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif sebesar 16% dari data garis dasar tahun 2017 dalam waktu lima tahun setelah penetapan kawasan konservasi.

4.3 Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan yang akan diterapkan oleh UPTD Balai KKPD terhadap TPK Kepulauan Widi mengacu pada sasaran dan tujuan pengelolaan yang dicapai dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Strategi pengelolaan mencakup beberapa aspek antara lain tata kelola kelembagaan, sumber daya alam dan sosial ekonomi⁸. Berikut ini adalah strategi pengelolaan kawasan TPK Kepulauan Widi beserta program-program yang direncanakan.

1. Aspek penguatan tata kelola kelembagaan

Program yang bisa dijalankan terkait dengan aspek ini adalah:

- a) Pembinaan sumber daya manusia;
- b) Peningkatan kapasitas infrastruktur (sarana dan prasarana);
- c) Penyusunan SOP pengelolaan kawasan;
- d) Pengembangan kemitraan;
- e) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan;
- f) Monitoring dan evaluasi.

2. Aspek sumber daya alam

Program yang bisa dilakukan dalam aspek sumber daya alam adalah:

⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010, tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (pasal 6).

- a) Perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b) Rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c) Penelitian dan pengembangan;
- d) Pariwisata dan jasa lingkungan;
- e) Pengawasan dan pengendalian.

3. Aspek sosial ekonomi

Program yang bisa dilakukan dalam aspek sosial ekonomi adalah:

- a) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- b) Pemberdayaan masyarakat;
- c) Penjangkauan dan penyadartahuan;
- d) Monitoring sosial ekonomi.

4.4 Rencana Jangka Menengah dan Tahunan

Strategi pengelolaan akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana jangka menengah dan kegiatan tahunan dan dapat ditinjau ulang setiap tahun untuk penyesuaian dalam mencapai tujuan pengelolaan. Detail rencana kerja jangka panjang (20 tahun) terdapat dalam Tabel 4-1, rencana kerja jangka menengah (5 tahun) dalam Tabel 4-2 dan rencana kerja jangka pendek (1 tahun) pada Tabel 4-3.

Tabel 4-1 Rencana kerja jangka panjang (20 tahun) TPK Kepulauan Widi

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
A. Strategi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan								
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1.1 Perekrutan staf pengelola kawasan (ASN dan non ASN)	√	√	√		APBN, APBD dan Sumber lainnya	600	Dinas terkait
	1.2 Diklat dasar konservasi (MPA 101)	√	√	√	√	APBD, APBN dan Sumber lainnya	400	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO
	1.3 Diklat pemantauan <i>Cetacean</i>	√	√	√		APBD, APBN, dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO
	1.4 Diklat monitoring terumbu karang, lamun, mangrove dan ikan karang	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	400	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO
	1.5 Diklat perencanaan program	√				APBD, APBN dan Sumber lainnya	400	DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, Perguruan Tinggi, NGO LSM
	1.6 Diklat dan sertifikasi selam	√	√	√		APBD, dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
2. Penatakelolaan kelembagaan	2.1 Inisiasi pembentukan forum komunikasi	√				APBN, APBD, dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Dinas terkait, Perguruan Tinggi, NGO
3. Pengembangan sarana dan prasarana	3.1 Pengadaan kantor untuk unit pengelola	√				APBD, APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, BUMN
	3.2 Pembangunan pos pengawasan	√				APBD, APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta
	3.3 Pengadaan sarana komunikasi pengawasan (radio, <i>drone</i> , teropong)	√	√	√	√	APBD, APBN dan Sumber lainnya	1200	Dinas terkait, LSM
	3.4 Pengadaan <i>speedboat</i> dan <i>longboat</i> pengawasan	√	√			APBD, APBN dan Sumber lainnya	1400	KKP, DKP, Swasta
	3.5 Pengadaan alat selam dan kompresor	√	√			APBD, APBN dan Sumber lainnya	650	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM
	3.6 Pembuatan dan pemasangan batas kawasan dan zonasi dengan <i>mooring bouy</i>	√	√	√		APBD, APBN dan Sumber lainnya	900	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
	3.7 Pengadaan perlengkapan kantor unit pengelola	√	√			APBD, APBN dan Sumber lainnya	800	DKP, UPTD, Swasta, BUMN
	3.8 Pembuatan dan pemasangan papan informasi kawasan konservasi	√	√	√		APBD, APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM
4. Penyusunan SOP pengelolaan kawasan	4.1 Penyusunan SOP monitoring dan pemanfaatan sumber daya	√				APBD, APBN, dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM
	4.2 Penyusunan SOP pengawasan	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM
	4.3 Penyusunan aturan tentang kegiatan wisata di kawasan konservasi	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM
5. Pengembangan kemitraan	5.1 <i>Workshop</i> membangun kemitraan dengan instansi terkait (misalnya; perguruan tinggi, dan penegak hukum)	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	400	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM
6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	6.1 <i>Workshop</i> identifikasi sistem pendanaan berkelanjutan	√				APBD	400	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
						APBN, dan Sumber lainnya		
	6.2 Pengembangan model investasi	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	1.000	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
7. Monitoring dan evaluasi	7.1 Rapat evaluasi unit pengelola kawasan setiap tiga bulan	√	√	√	√	APBD, APBN dan Sumber lainnya	600	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
	7.2 Monitoring pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan pemanfaatan sumber daya	√				APBD, APBN dan Sumber lainnya	150	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
	7.3 Monitoring dan evaluasi penerapan SOP	√	√	√	√	APBD APBN dan Sumber lainnya	500	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
B. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam								
1. Perlindungan habitat dan populasi ikan	1.1 Sosialisasi dan kampanye tentang perlindungan terumbu karang, lamun, mangrove dan spesies terancam punah	√	√	√	√	APBD, APBN dan Sumber lainnya	800	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
	1.2 Sosialisasi dan kampanye tentang bahaya sampah terhadap ekosistem	√	√	√	√	APBD, APBN dan Sumber lainnya	800	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
2. Rehabilitasi habitat	2.1 Pemulihan ekosistem melalui transplantasi karang, dan rehabilitasi mangrove	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	900	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
3. Penelitian dan pengembangan	3.1 Pembuatan profil kawasan	√	√	√	√	APBD APBN dan Sumber lainnya	1000	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
	3.2 Monitoring dan menyusun data dasar spesies langka dan terancam punah	√	√	√	√	APBD APBN dan Sumber lainnya	1.200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Perguruan tinggi, Swasta, LSM
	3.3 Monitoring rutin terhadap kesehatan terumbu karang, lamun dan mangrove	√	√	√	√	APBN APBD dan Sumber lainnya	1.200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Perguruan tinggi, Swasta, LSM
	3.4 Penilaian daya dukung lingkungan untuk wisata	√	√	√	√	APBD APBN dan Sumber lainnya	400	DKP, UPTD, Dinas terkait, Perguruan tinggi, Swasta, LSM
4. Pemanfaatan sumber daya ikan	4.1 Sosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan	√	√	√	√	APBD, APBN dan Sumber lainnya	800	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
5. Pariwisata alam dan jasa lingkungan	5.1 Promosi potensi wisata (pembuatan <i>website</i> , iklan, <i>pos tourist information</i>)	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	600	DKP, Dispar, Dinas terkait, Swasta, LSM
	5.2 Penyusunan <i>Code of conduct</i> wisata berinteraksi dengan biota	√	√	√		APBD, APBN, dan Sumber lainnya	400	DKP, Dispar, Dinas terkait, Swasta, LSM
	5.3 Pembangunan tracking mangrove		√			APBD, APBN, dan Sumber lainnya	1.000	DKP, Bappeda, Dispar, Dinas terkait, Swasta, LSM
6. Pengawasan	6.1 Patroli di wilayah kawasan oleh POKMASWAS	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	2.000	DKP, POKMASWAS
	6.2 Patroli terpadu	√	√	√	√	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	2.500	DKP, POLAIR, PSDKP, TNI-AL, POLSUS, Swasta
C. Strategi penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya								
1. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat	1.1 Pembangunan lokasi usaha mikro dan UKM	√	√	√	√	APBD, dan Sumber lainnya	2.000	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
2. Pemberdayaan masyarakat	2.1 Pelatihan pemandu wisata	√	√	√	√	APBD, dan Sumber lainnya	400	DKP, DISPAR, BUMN, Swasta, LSM
	2.2 Pembentukan dan pendampingan kelompok usaha bersama (KUB) masyarakat	√	√	√	√	APBD APBN, dan Sumber lainnya	1.200	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM
	2.3 Pembentukan dan pelatihan POKMASWAS	√	√	√	√	APBN, APBD dan Sumber lainnya	600	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
	2.4 Pembentukan dan pelatihan POKDARWIS	√	√	√	√	APBN, APBD dan Sumber lainnya	600	DKP, UPTD, DISPAR, Swasta, LSM
	2.5 Pelatihan pengolahan sampah	√	√	√	√	APBN, APBD dan Sumber lainnya	1.200	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM
3. Pelestarian adat dan budaya	3.1 <i>Assesment</i> kearifan lokal, adat dan budaya ;	√				APBD dan Sumber lainnya	100	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM
	3.2 Pembentukan sanggar seni dan budaya	√				APBD dan Sumber lainnya	100	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 20 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
	3.3 Pengadaan alat musik tradisional	√				APBD dan Sumber lainnya	200	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM
	3.4 Pengembangan event festival pariwisata	√	√	√	√	APBD APBN, dan Sumber lainnya	2.500	DKP, DISPAR, KOPERINDAG, BUMN, Swasta, LSM
4. Penjangkauan dan penyadartahuan	4.1 Sosialisasi tentang manfaat kawasan konservasi dan biota yang dilindungi	√	√	√	√	APBD APBN dan Sumber lainnya	1.000	DKP, DISPAR, UPTD, Swasta, LSM
5. Monitoring dan evaluasi	5.1 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi	√	√	√	√	APBD APBN dan Sumber lainnya	800	UPTD, DKP, Swasta

Tabel 4-2 Rencana kerja jangka menengah (5 tahun) TPK Kepulauan Widi

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
A. Strategi penguatan tata kelola kelembagaan										
1. Peningkatan sumber daya manusia	1.1 Perekrutan staf pengelola kawasan (ASN dan non ASN) - Persiapan perekrutan (<i>assessment</i> kebutuhan staf pengelola) - Penyebarluasan informasi perekrutan staf sesuai kebutuhan - Peninjauan kadidat staf dan <i>interview</i> - SK kandidat terpilih	Tersedianya personil sesuai kebutuhan (3 orang ASN dan 2 orang non ASN)	50	100	50			APBD, APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, Dinas terkait (BKD)
	1.2 Diklat MPA 101 untuk personil unit pengelola - Persiapan Diklat - <i>Pre test</i> - <i>Post test</i> - Laporan kegiatan	Terlatihnya personil unit pengelola	50		50			APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Perguruan tinggi, NGO.
	1.3 Diklat pemantauan <i>Cetacean</i> - Persiapan diklat - <i>Pre test</i> dan <i>Post test</i>	5 personil terlatih	25	50	25			APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Perguruan tinggi, NGO.

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Diklat pemantauan <i>Cetacean</i> - Laporan kegiatan									
	1.4 Diklat monitoring terumbu karang, lamun, mangrove dan ikan karang - Persiapan diklat - Praktek survei/monitoring ekosistem dan ikan karang - Laporan hasil praktek survei/monitoring	5 personil terlatih	50	50				APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Bappeda, Perguruan tinggi, LSM
	1.5 Diklat perencanaan program - Persiapan diklat - Diklat perencanaan program - Laporan hasil diklat	2 personil terlatih	50	50				APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Bappeda, Perguruan tinggi, LSM, Swasta
	1.6 Diklat dan sertifikasi selam - Persiapan diklat - Pelaksanaan diklat selam	2 personil tersertifikasi			100			APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Bappeda, Perguruan tinggi, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
2. Penatakelolaan kelembagaan	2.1 <i>Workshop</i> Inisiasi pembentukan forum komunikasi - Persiapan <i>workshop</i> - Pelaksanaan <i>workshop</i> pembentukan forum komunikasi - Laporan hasil <i>workshop</i>	Sedikitnya 1 forum komunikasi terbentuk				50		APBD, APBN, dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM
3. Pengembangan sarana dan prasarana	3.1 Pengadaan kantor untuk unit pengelola - Kajian lokasi pembangunan kantor - Pembangunan kantor unit pengelola	1 unit kantor	300					APBD APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Bappeda, BUMN
	3.2 Pembangunan pos pengawasan - Identifikasi lokasi pembangunan pos pengawasan - Pembangunan pos pengawasan	1 unit pos pengawas		200				APBD APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, BUMN, Swasta
	3.3 Pengadaan sarana komunikasi untuk pengawas - <i>Assesment</i> kebutuhan alat - Pengadaan sarana komunikasi (Radio,	Tersedia minimal masing masing 2 alat komunikasi	50	150	100			APBD APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, BUMN, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	drone, teropong, GPS, life jaket)									
	3.4 Pengadaan <i>speedboat</i> dan <i>longboat</i> untuk pengawasan - Persiapan - Pengadaan <i>speedboat</i> tahap 1 - Pengadaan <i>longboat</i> tahap 1 - Pengadaan <i>speedboat</i> tahap 2 - Pengadaan <i>longboat</i> tahap 2 - Laporan pengadaan	2 unit <i>speedboat</i> dan 2 unit <i>longboat</i>		350	350			APBD APBN dan Sumber lainnya	700	KKP, DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, BUMN, Swasta
	3.5 Pengadaan alat selam dan kompresor - Persiapan - Pengadaan alat selam 5 set - Pengadaan kompresor - Laporan pengadaan	5 set alat selam dan 1 unit kompresor		200	300	150		APBD APBN dan Sumber lainnya	650	DKP, UPTD, Dispar, Swasta, BUMN, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	3.6 Pembuatan dan pemasangan batas kawasan dan batas zonasi (<i>mooring buoy</i>) - Identifikasi lokasi batas kawasan dan zonasi - Pembuatan <i>mooring buoy</i> - Pemasangan batas kawasan dan batas zonasi	35 <i>mooring bouy</i> terpasang dan diganti apabila ada yang rusak (maksimal 60 <i>mooring bouy</i>)	50	50	75	75	50	APBD APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Dispar, Swasta, BUMN, LSM
	3.7 Pengadaan perlengkapan kantor unit pengelola - Persiapan - Pengadaan perlengkapan kantor (Komputer, printer, meja dan kursi kerja, lemari dokumen dll) - Laporan pengadaan	5 set perlengkapan kantor tersedia	100	150	150			APBD APBN dan Sumber lainnya	400	DKP, UPTD, Bappeda, Swasta, BUMN, LSM
	3.8 Pembuatan dan pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi - Identifikasi lokasi pemasangan papan informasi	4 papan informasi terpasang dan yang rusak dapat diganti (maksimal 8	50		25		25	APBD APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Pembuatan papan informasi tentang kawasan konservasi - Pemasangan papan informasi kawasan konservasi	papan pengganti)								
4. Penyusunan SOP pengelolaan kawasan	4.1 Penyusunan SOP monitoring dan pemanfaatan sumber daya - Rapat persiapan - Penyusunan SOP	1 SOP pemanfaatan , 1 SOP monitoring		50				APBD APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Dispar, Swasta, Dinas terkait lainnya
	4.2 Penyusunan SOP pengawasan - Rapat persiapan - Penyusunan SOP pengawasan sumber daya	1 SOP pengawasan sumber daya	50					APBD APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Swasta, Dinas terkait lainnya
	4.3 Penyusunan aturan tentang kegiatan wisata di kawasan konservasi - Rapat persiapan - Penyusunan SOP kegiatan wisata di kawasan konservasi	1 SOP kegiatan wisata di kawasan		50				APBD APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Dispar, Swasta, Dinas terkait lainnya

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
5. Pengembangan kemitraan	5.1 <i>Workshop</i> untuk membangun kemitraan dengan instansi terkait - Persiapan - <i>Workshop</i> untuk membangun kemitraan dengan instansi terkait - Laporan hasil <i>workshop</i>	Setidaknya 5 mitra			50	50		APBD APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Bappeda, Dispar, Dinas terkait lainnya, LSM
6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	6.1 <i>Workshop</i> identifikasi sistem pendanaan berkelanjutan - Persiapan <i>workshop</i> - <i>Workshop</i> indentifikasi sistem pendanaan berkelanjutan - Laporan	2 kali <i>workshop</i>			100	100		APBD APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM.
	6.2 Pengembangan model investasi	1 model investasi			75	75	100	APBN APBD dan Sumber lainnya	250	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM.
7. Monitoring dan evaluasi	7.1 Rapat evaluasi unit pengelola kawasan setiap tiga bulan - Persiapan rapat - Rapat evaluasi	5 Laporan tahunan	40	40	40	40	40	APBN APBD dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait.

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Laporan hasil rapat evaluasi unit pengelola									
	7.2 Monitoring pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan pemanfaatan sumber daya - Monitoring pemasangan papan informasi kawasan dan pemanfaatan sumber daya - Laporan monitoring	Laporan monitoring	50		50		50	APBN APBD dan Sumber lainnya	150	DKP, UPTD, Swasta, Dinas terkait.
	7.3 Monitoring dan evaluasi penerapan SOP - Monitoring penerapan SOP - Laporan hasil evaluasi penerapan SOP	3 laporan evaluasi SOP		50	50	25		APBN APBD dan Sumber lainnya	125	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, LSM
B. Strategi penguatan pengelolaan sumber daya alam										
1. Perlindungan habitat dan populasi ikan	1.1 Sosialisasi dan kampanye tentang perlindungan terumbu karang, lamun, mangrove dan spesies terancam punah	8 Desa yang masuk dalam kawasan		50	50	50	50	APBD, APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, LSM, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Persiapan pengumpulan bahan materi - Produksi materi - Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye - Laporan kegiatan	Minimal 2 sekolah dan 2 kelompok pemuda setiap Desa								
	1.2 Sosialisasi tentang bahaya sampah terhadap ekosistem - Persiapan pengumpulan bahan materi - Produksi materi - Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye - Laporan kegiatan	8 Desa yang masuk dalam kawasan Minimal 2 sekolah dan 2 kelompok pemuda setiap Desa		50	50	50	50	APBD, APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dinas terkait, LSM, Swasta
2. Rehabilitasi habitat	2.1 Transplantasi terumbu karang - Identifikasi lokasi yang berpotensi untuk di transplantasi - Penyediaan transplan - Pelaksanaan kegiatan transplantasi karang - Laporan kegiatan	Sedikitnya 2 lokasi terumbu karang rusak di transplantasi			75	50		APBD, APBN, dan Sumber lainnya	225	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, Swasta, NGO

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	2.2 Penanaman mangrove - Survei lokasi dan identifikasi kesesuaian jenis - Penyediaan bibit mangrove - Laporan kegiatan	1 ha lokasi kritis di rehabilitasi			50	50		APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, Swasta, NGO
3. Penelitian dan pengembangan	3.1 Pembuatan profil kawasan - Persiapan materi - Produksi materi	Tersedianya profil kawasan dan <i>ter-publish</i>		75	50	75	50	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	250	DKP, UPTD, DLH, DISPAR, Perguruan Tinggi, Swasta NGO
	3.2 Monitoring dan menyusun data dasar spesies langka dan terancam punah - Kajian metodologi - Survei lokasi - Pendataan biota (1 kali dalam 2 tahun) - Pelaporan hasil survei	1 laporan monitoring Tersedianya data <i>time series</i>	100		100		100	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, Swasta, NGO, Pokmaswas

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	3.3 Monitoring rutin terhadap kesehatan terumbu karang, lamun dan mangrove - Kajian metodologi - Pendataan ekosistem - Pelaporan hasil survei	1 laporan monitoring Tersedianya data <i>time series</i>	50	75	50	75	50	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta
	3.4 Penilaian daya dukung lingkungan untuk wisata - Persiapan - Pelaksanaan kegiatan survei - Laporan hasil survei	1 laporan daya dukung wisata di kawasan	25	75				APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta
4. Pemanfaatan sumber daya ikan	4.1 Sosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan - Persiapan - Produksi materi - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi - Pelaporan hasil sosialisasi	8 desa yang masuk dalam kawasan Sedikitnya 4 kelompok nelayan	25	50	50	50	25	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta
5. Pariwisata alam dan jasa lingkungan	5.1 Promosi potensi wisata (pembuatan <i>website</i> , iklan, <i>pos tourist information</i> , dll) - Persiapan	1 website upt Minimal mempublikas		50	50	25	25	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	150	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Pembuatan <i>website</i> - Publikasi melalui media tentang potensi wisata	ikan potensi wisata 1 kali dalam satu bulan								
	5.2 Penyusunan <i>Code of conduct</i> wisata berinteraksi dengan biota yang dilindungi - Persiapan - Penyusunan <i>Code of conduct</i> wisata berinteraksi dengan biota yang dilindungi bersama <i>team</i> - Laporan	1 <i>Code of conduct</i> untuk beberapa biota yang dilindungi		50	50			APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Bappeda, Dispar Perguruan Tinggi, NGO, Swasta
6. Pengawasan	6.1 Patroli di wilayah kawasan secara berkala oleh Pokmaswas - Persiapan - Patroli - Laporan patroli	Laporan tahunan POKMASWA S dan Logbook terisi setiap bulan	100	100	100	100	100	APBD, APBN dan Sumber lainnya	500	DKP, UPTD, Bappeda, Dispar Perguruan Tinggi, NGO, Swasta, pokmaswas
	6.2 Patroli terpadu - Persiapan - Patroli terpadu dengan PSDKP, TNI, POLAIR, UPTD, DKP	20 kali	102	102	102	102	102	APBD, APBN dan Sumber lainnya	510	PSDKP, DKP, UPTD, TNI AL, POLAIR, Polsus, Swasta, Pokmaswas

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	(setiap tiga bulan 1 kali) - Laporan hasil patroli									
C. Strategi penguatan sosial ekonomi dan budaya										
1. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat	1.1 Pembangunan lokasi usaha mikro dan UKM - Kajian lokasi pembangunan dan pengembangan usaha mikro dan UKM - Persiapan - Pembentukan <i>pilot project</i> pengembangan usaha mikro dan UKM - Laporan	2 lokasi <i>pilot project</i>		150	150	200		APBD APBN dan Sumber lainnya	500	DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, LSM, BUMN, Swasta, Pemerintah Desa
2. Pemberdayaan masyarakat	2.1 Pelatihan pemandu wisata bahari - Persiapan pelatihan - Pelatihan - Laporan hasil pelatihan	4 kali pelatihan		25	25	25	25	APBD APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Dispar, Dinas terkait, Swasta BUMN, LSM
	2.2 Pembentukan dan pendampingan kelompok usaha bersama (KUB) masyarakat - Persiapan	8 Kelompok terbentuk dan di dampingi		100	100	50	50	APBD APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan,

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Pembentukan kelompok - Pendampingan - Laporan									Swasta, BUMN, LSM
	2.3 Pembentukan dan pelatihan POKMASWAS - Persiapan - Pembentukan dan pelatihan kelompok - Laporan	8 kelompok Pokmaswas	50	75	75			APBD APBN dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM
	2.4 Pembentukan dan pelatihan POKDARWIS - Persiapan - Pembentukan dan pelatihan kelompok - Laporan	4 kelompok POKDARWIS	50	50				APBD APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM
	2.5 Pelatihan pengolahan sampah - Persiapan - Pelatihan pengolahan sampah - Laporan	8 kelompok		75	75	75	75	APBD APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM
3. Pelestarian adat dan budaya	3.1 Assesment kearifan lokal, adat dan budaya	Sedikitnya 2 kearifan lokal teridentifikasi dan masuk dalam buku		25	75			APBD, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
		panduan wisata								
	3.2 Pembentukan sanggar seni dan budaya	2 sanggar seni		100				APBD APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM
	3.3 Pengadaan alat musik tradisional	2 set alat musik tradisional		100	100			APBD APBN, dan Sumber lainnya	200	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM
	3.4 Pengembangan event festival pariwisata	Festival wisi Internasional selalu terlaksana setiap tahunnya		150	100	150	100	APBD APBN, dan Sumber lainnya	500	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM
4. Penjangkauan dan penyadartahuan	4.1 Sosialisasi tentang manfaat kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Persiapan materi - Sosialisasi tentang kawasan konservasi	5 paket sosialisasi	50		100		100	APBD APBN dan Sumber lainnya	250	Dinas terkait, LSM, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Detail Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
			2020	2021	2022	2023	2024			
	dan biota yang dilindungi - Laporan hasil sosialisasi									
5. Monitoring dan evaluasi	5.1 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi - Persiapan rencana monitoring - Monitoring sosial ekonomi - Laporan hasil monitoring dan evaluasi	5 kali monitoring, 5 laporan hasil monitoring		50	50	50	50	APBD APBN dan Sumber lainnya	200	Dinas terkait, LSM, Swasta

Tabel 4-3 Rencana kerja tahunan (1 tahun) TPK Kepulauan Widi

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
A. Strategi Penguatan tata kelola kelembagaan									
1. Peningkatan sumber daya manusia	1.1 Perekrutan staf pengelola kawasan (ASN dan non ASN) - Persiapan perekrutan (<i>assessment</i> kebutuhan staf pengelola) - Penyebarluasan informasi perekrutan staf sesuai kebutuhan - Peninjauan kadidat staf dan <i>interview</i> - SK kandidat terpilih	Tersedianya personil sesuai kebutuhan (1 orang ASN dan 1 orang non ASN)	25	25			APBD dan Sumber lainnya	50	DKP, Dinas terkait (BKD)
	1.2 Diklat MPA 101 untuk personil unit pengelola - Persiapan Diklat - <i>Pre test</i> - <i>Post test</i> - Laporan kegiatan	Terlatihnya 2 personil unit pengelola				50	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Perguruan tinggi, NGO
	1.3 Diklat pemantauan <i>Cetacean</i> - Persiapan diklat - <i>Pretest</i> dan <i>Post test</i> - Pelaksanaan diklat pemantauan <i>Cetacean</i> - Laporan kegiatan	2 personil terlatih			25		APBD, APBN dan Sumber lainnya	25	DKP, UPTD, Perguruan tinggi, NGO.

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
	1.4 Diklat monitoring terumbu karang, lamun, mangrove dan ikan karang - Persiapan diklat - Praktek survei/monitoring ekosistem dan ikan karang - Laporan hasil praktek survei/monitoring	2 personil terlatih		25		25	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Perguruan tinggi, LSM,
	1.5 Diklat perencanaan program - Persiapan diklat - Diklat perencanaan program - Laporan hasil diklat	2 personil terlatih				50	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Perguruan tinggi, LSM, Swasta
2. Pengembangan sarana dan prasarana	2.1 Pengadaan kantor untuk unit pengelola - Kajian lokasi pembangunan kantor - Pembangunan kantor unit pengelola	1 unit kantor tersedia dan berfungsi		100	100	100	APBD, APBN dan Sumber lainnya	300	DKP, UPTD, Bappeda, BUMN
	2.2 Pengadaan sarana komunikasi untuk pengawas - <i>Assesment</i> kebutuhan alat - Pengadaan sarana komunikasi (Radio, drone, teropong, GPS, jaket pelampung)	Tersedia minimal masing masing 1 alat komunikasi			25	25	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Dinas terkait, BUMN, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
	2.3 Pembuatan dan pemasangan batas kawasan dan batas zonasi (<i>mooring buoy</i>) - Identifikasi lokasi batas kawasan dan zonasi - Pembuatan <i>mooring buoy</i> - Pemasangan batas kawasan dan batas zonasi	25 <i>mooring buoy</i> terpasang		25		25	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Dispar, Swasta, BUMN, LSM, Swasta
	2.4 Pengadaan perlengkapan kantor unit pengelola - Persiapan - Pengadaan perlengkapan kantor (Komputer, printer, meja dan kursi kerja, lemari dokumen dll) - Laporan pengadaan	2 set peralatan kantor		25	50	25	APBD, APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Bappeda, Swasta, BUMN, LSM
	2.5 Pembuatan dan pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi - Identifikasi lokasi pemasangan papan informasi - Pembuatan papan informasi tentang kawasan konservasi	4 papan informasi terpasang dan yang rusak dapat diganti		25		25	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta, BUMN, LSM, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
	- Pemasangan papan informasi kawasan konservasi								
3. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan	3.1 Penyusunan SOP pengawasan - Rapat persiapan - Penyusunan SOP pengawasan sumber daya	1 SOP pengawasan sumber daya				50	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Bappeda, Dispar, Dinas terkait lainnya, Swasta
4. Monitoring dan evaluasi	4.1 Rapat evaluasi unit pengelola kawasan setiap tiga bulan - Persiapan Rapat - Rapat Evaluasi - Laporan hasil rapat evaluasi unit pengelola	4 kali rapat	10	10	10	10	APBN, APBD dan Sumber lainnya	40	DKP, UPTD, Dinas terkait
	4.2 Monitoring pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan pemanfaatan sumber daya - Monitoring pemasangan papan informasi kawasan dan pemanfaatan sumber daya - Laporan monitoring	2 laporan monitoring		25	25		APBN, APBD dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Dinas terkait, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
B. Strategi penguatan pengelolaan sumber daya alam									
1. Penelitian dan pengembangan	1.1 Monitoring dan menyusun data dasar spesies langka dan terancam punah - Kajian metodologi - Survei lokasi - Pendataan biota - Pelaporan hasil survei	1 laporan monitoring				100	APBD, APBN dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta
	1.2 Monitoring rutin terhadap kesehatan terumbu karang, lamun dan mangrove - Kajian metodologi - Pendataan ekosistem - Pelaporan hasil survei	1 laporan monitoring tiap ekosistem				50	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta
	1.3 Penilaian daya dukung lingkungan untuk wisata - Persiapan - Pelaksanaan kegiatan survei - Laporan hasil survei	1 laporan daya dukung wisata di kawasan				25	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	25	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta
2. Pemanfaatan sumber daya ikan	2.1 Sosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan - Persiapan - Produksi materi - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	2 desa dan 2 kelompok nelayan				25	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	25	DKP, UPTD, Perguruan Tinggi, NGO, Pokmaswas, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
	- Pelaporan hasil sosialisasi								
3. Pengawasan	3.1 Patroli dan pengawasan kawasan secara berkala oleh pokmaswas - Persiapan - Patroli - Laporan patroli	3 laporan triwulan		50	25	25	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	100	DKP, UPTD, NGO, Pokmaswas, Swasta
	3.2 Patroli terpadu - Persiapan - Patroli terpadu dengan PSDKP, TNI, POLAIR, UPTD, DKP (setiap tiga bulan 1 kali) - Laporan hasil patroli	3 laporan triwulan		42	30	30	APBD, APBN dan Sumber lainnya	102	PSDKP, DKP, UPTD, TNI AL, POLAIR, Polsus, Swasta
C. Strategi penguatan sosial ekonomi dan budaya									
1. Pemberdayaan masyarakat	1.1 Pembentukan dan pelatihan POKMASWAS - Persiapan - Pembentukan dan pelatihan kelompok - Laporan	3 kelompok Pokmaswas terbentuk dan terlatih			50		APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM, Swasta
	1.2 Pembentukan dan pelatihan POKDARWIS - Persiapan - Pembentukan dan pelatihan kelompok - Laporan	2 kelompok Pokdarwis terbentuk dan terlatih				50	APBD, APBN dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Dispar, Dinas pemberdayaan, Swasta, BUMN, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Mitra pelaksana potensial
			I	II	III	IV			
2. Penjangkauan dan penyadartahuan	2.1 Sosialisasi tentang manfaat kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Persiapan materi - Sosialisasi tentang kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Laporan hasil sosialisasi	4 desa tersosialisasi			25	25	APBD, APBN, dan Sumber lainnya	50	DKP, UPTD, Swasta BUMN, LSM

5. PENUTUP

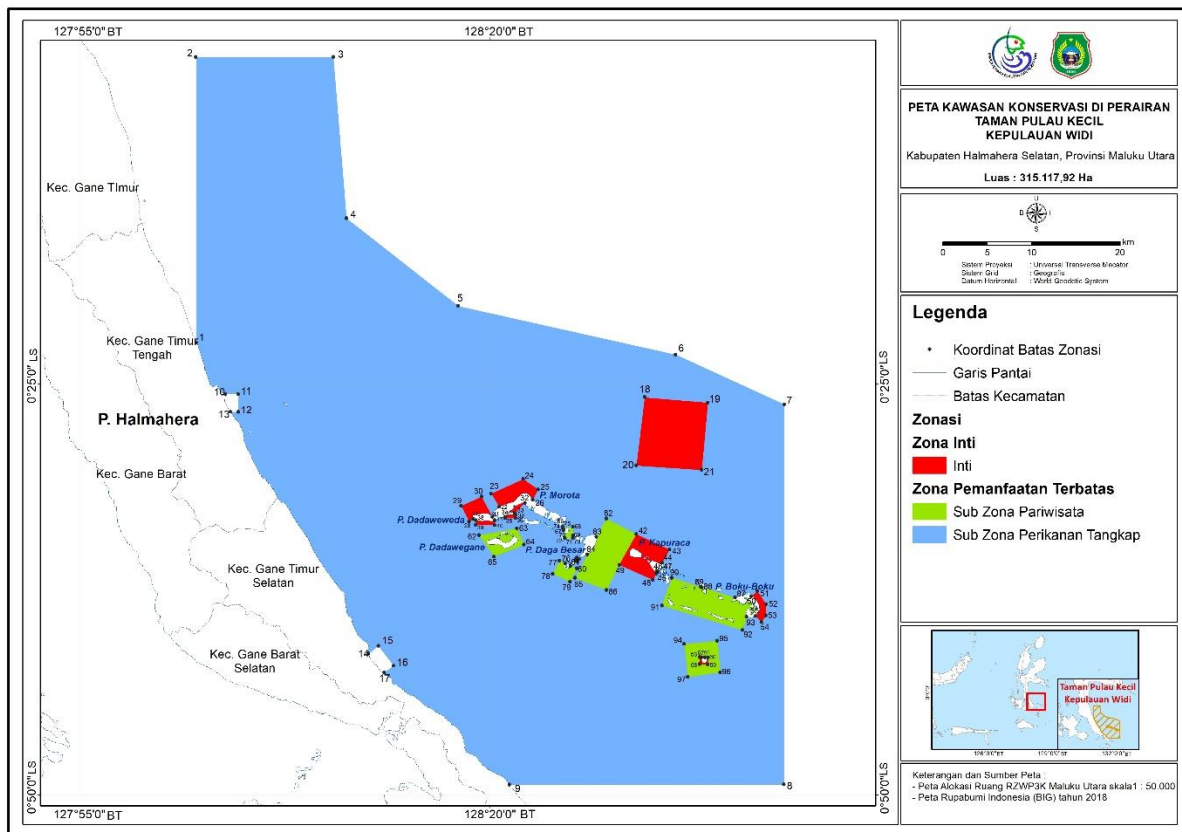
Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi merupakan pedoman dalam pengelolaan sumber daya laut secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat visi dan misi, sasaran dan tujuan pengelolaan serta rencana jangka menengah dan tahunan TPK Kepulauan Widi. Selain itu juga data tentang ekosistem, sosial ekonomi dan budaya juga tersedia dalam RPZ ini yang diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak terkait yang memerlukan serta membantu dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Gane Timur Tengah. 2018. *Kecamatan Gane Timur Tengah dalam Angka 2018*. Halmahera Selatan-Maluku Utara.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Gane Timur Selatan. 2018. *Kecamatan Gane Timur Tengah dalam Angka 2018*. Halmahera Selatan-Maluku Utara.
- [BMKG] Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. 2019. Analisis curah Hujan. (<https://www.bmkg.go.id/tag/?tag=informasi-hujan-bulanan&lang>).
- Dhannahisvara, A.J dan Pingkan, J. 2019. Kompilasi Hasil Analisis menggunakan Sistim Informasi Geografis terhadap Perairan Maluku Utara (Dukungan Rancangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Maluku Utara).
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Direktorat PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Data Pulau pulau kecil (Data file).
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. 2017. *Dokumen Usulan Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K) Gugusan Pulau Widi*. Kabupaten Halmahera Selatan. Provinsi Maluku Utara.
- Kabupaten Halmahera Selatan. 2012. *Buku Putih Sanitasi Halmahera Selatan*. Provinsi Maluku Utara.
- Lestari, WP. 2017. *Laporan Survei Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Maluku Utara 2017*. Wildlife Conservation Society - Indonesia Program. Bogor. Indonesia
- Muttaqin, A., Pardede, S., Tarigan, S. A., Setiawan, F. Muhidin. 2017. *Kajian Ekologi Terumbu Karang Kawasan Konservasi Perairan Derah Maluku Utara Tahun 2017*. Wildlife Conservation Society - Indonesia Program. Bogor. Indonesia.
- PT. Leadership of Island Indonesia. 2018. *Preliminary report, Marine Ecosystem of Widi Islands*. North Mollucas. Indonesia
- RPI2-JM Kab. Halmahera Selatan. 2014. *Bantuan Teknis RPI2JM dalam Implementasi dan Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta Karya*. Provinsi Maluku Utara
- Triadi, R., Zainuri, M., & Yusuf, M. 2015. *Pola Distribusi Kandungan Klorofil-A dan Suhu Permukaan Laut di Perairan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Oseanografi Volume 4, Nomor 1, 233-241.
- Umar, M. 2018. *Potensi Ekowisata Bahari dan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten Halmahera Selatan*. Journal Geografi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta dan batas masing masing zona di Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi



Lampiran 2. Titik koordinat batas masing masing zona di Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi

Zona	Kode	Nomor Titik Koordinat	Koordinat		Luas (ha)
			Bujur Timur	Lintang Selatan	
Inti	1	18	128° 29' 24,57" BT	0° 25' 47,75" LS	5.563,05
		19	128° 33' 15,82" BT	0° 26' 7,81" LS	
		20	128° 28' 54,71" BT	0° 29' 57,22" LS	
		21	128° 32' 52,96" BT	0° 30' 12,89" LS	
	2	22	128° 20' 33,15" BT	0° 32' 28,37" LS	794,38
		23	128° 20' 3,38" BT	0° 31' 39,83" LS	
		24	128° 22' 0,86" BT	0° 30' 46,85" LS	
		25	128° 22' 55,64" BT	0° 31' 24,77" LS	
		26	128° 22' 35,33" BT	0° 32' 1,92" LS	
	3	27	128° 18' 58,69" BT	0° 33' 12,31" LS	461,35
		28	128° 18' 43,17" BT	0° 33' 21,72" LS	
		29	128° 18' 14,24" BT	0° 32' 24,41" LS	
		30	128° 19' 28,92" BT	0° 31' 51,03" LS	
		31	128° 20' 8,45" BT	0° 33' 5,10" LS	
	4	32	128° 22' 6,81" BT	0° 32' 14,31" LS	78,49
		33	128° 21' 29,41" BT	0° 32' 50,91" LS	
	5	34	128° 20' 55,09" BT	0° 33' 4,54" LS	45,01
		35	128° 20' 55,10" BT	0° 33' 9,45" LS	
		36	128° 21' 33,49" BT	0° 33' 9,41" LS	
		37	128° 21' 33,62" BT	0° 32' 56,35" LS	
	6	38	128° 19' 8,44" BT	0° 33' 17,20" LS	101,41
		39	128° 19' 7,05" BT	0° 33' 33,81" LS	
		40	128° 20' 16,90" BT	0° 33' 34,65" LS	
		41	128° 20' 16,57" BT	0° 33' 17,23" LS	
	7	42	128° 28' 54,67" BT	0° 34' 7,90" LS	1.408,53
		43	128° 30' 55,32" BT	0° 35' 4,53" LS	
		44	128° 30' 29,17" BT	0° 35' 52,13" LS	
		45	128° 30' 12,17" BT	0° 36' 23,08" LS	
		46	128° 30' 8,27" BT	0° 36' 30,18" LS	
		47	128° 30' 7,62" BT	0° 36' 31,34" LS	
		48	128° 29' 54,96" BT	0° 36' 54,40" LS	
		49	128° 27' 51,75" BT	0° 36' 0,33" LS	
	8	50	128° 35' 54,32" BT	0° 37' 55,40" LS	256,52
		51	128° 36' 16,53" BT	0° 37' 36,08" LS	
		52	128° 36' 48,58" BT	0° 38' 23,86" LS	
		53	128° 36' 47,34" BT	0° 39' 4,60" LS	
		54	128° 36' 31,73" BT	0° 39' 28,39" LS	
		55	128° 36' 9,90" BT	0° 39' 6,66" LS	

Zona	Kode	Nomor Titik Koordinat	Koordinat		Luas (ha)
			Bujur Timur	Lintang Selatan	
	9	56	128° 32' 52,90" BT	0° 41' 37,63" LS	43,04
		57	128° 32' 45,68" BT	0° 41' 37,50" LS	
		58	128° 32' 45,13" BT	0° 42' 3,15" LS	
		59	128° 33' 15,75" BT	0° 42' 3,98" LS	
		60	128° 33' 15,95" BT	0° 41' 37,77" LS	
		61	128° 33' 4,99" BT	0° 41' 37,69" LS	
Pemanfaatan terbatas (sub zona Pariwisata)	10	62	128° 19' 19,46" BT	0° 34' 11,94" LS	739,98
		63	128° 21' 37,80" BT	0° 33' 46,75" LS	
		64	128° 22' 4,04" BT	0° 34' 45,98" LS	
		65	128° 20' 14,16" BT	0° 35' 29,82" LS	
	11	66	128° 24' 26,31" BT	0° 33' 43,82" LS	99,85
		67	128° 24' 25,92" BT	0° 33' 41,61" LS	
		68	128° 25' 2,56" BT	0° 33' 41,61" LS	
		69	128° 25' 2,55" BT	0° 34' 13,69" LS	
		70	128° 25' 2,55" BT	0° 34' 16,12" LS	
		71	128° 25' 2,55" BT	0° 34' 22,97" LS	
		72	128° 24' 33,12" BT	0° 34' 22,97" LS	
		73	128° 24' 28,13" BT	0° 33' 54,34" LS	
		74	128° 24' 27,69" BT	0° 33' 51,77" LS	
		75	128° 24' 27,13" BT	0° 33' 48,58" LS	
	12	76	128° 24' 34,63" BT	0° 35' 54,22" LS	330,16
		77	128° 24' 12,54" BT	0° 35' 45,10" LS	
		78	128° 23' 48,85" BT	0° 36' 33,20" LS	
		79	128° 24' 51,68" BT	0° 37' 1,80" LS	
		80	128° 25' 15,95" BT	0° 36' 12,93" LS	
		81	128° 24' 54,24" BT	0° 36' 3,60" LS	
	13	42	128° 28' 54,67" BT	0° 34' 7,90" LS	2.714,19
		49	128° 27' 51,75" BT	0° 36' 0,33" LS	
		82	128° 27' 4,98" BT	0° 33' 11,48" LS	
		83	128° 26' 27,86" BT	0° 34' 17,91" LS	
		84	128° 25' 55,15" BT	0° 35' 21,75" LS	
		85	128° 25' 10,40" BT	0° 36' 47,70" LS	
		86	128° 27' 6,04" BT	0° 37' 31,95" LS	
	14	87	128° 34' 55,18" BT	0° 38' 0,04" LS	2.892,71
		88	128° 32' 53,53" BT	0° 37' 22,04" LS	
		89	128° 32' 49,47" BT	0° 37' 20,78" LS	
		90	128° 31' 3,67" BT	0° 36' 47,72" LS	
		91	128° 30' 27,97" BT	0° 38' 28,72" LS	
		92	128° 35' 22,17" BT	0° 39' 58,01" LS	
		93	128° 35' 37,22" BT	0° 39' 10,51" LS	
	15	94	128° 31' 48,81" BT	0° 40' 48,57" LS	1.277,74

Zona	Kode	Nomor Titik Koordinat	Koordinat		Luas (ha)
			Bujur Timur	Lintang Selatan	
		95	128° 33' 49,74" BT	0° 40' 37,79" LS	
		96	128° 34' 0,58" BT	0° 42' 32,58" LS	
		97	128° 32' 2,20" BT	0° 42' 49,59" LS	
Pemanfaatan terbatas (sub zona perikanan tangkap)	16	1	128° 2' 6,49" BT	0° 22' 28,86" LS	298.344,64
		2	128° 2' 4,53" BT	0° 5' 5,76" LS	
		3	128° 10' 27,40" BT	0° 5' 5,76" LS	
		4	128° 11' 15,08" BT	0° 14' 54,26" LS	
		5	128° 18' 3,17" BT	0° 20' 14,41" LS	
		6	128° 31' 17,95" BT	0° 23' 12,14" LS	
		7	128° 37' 55,53" BT	0° 26' 13,87" LS	
		8	128° 37' 53,70" BT	0° 49' 22,37" LS	
		9	128° 21' 10,58" BT	0° 49' 23,42" LS	
		10	128° 3' 52,45" BT	0° 25' 36,51" LS	
		11	128° 4' 39,21" BT	0° 25' 37,09" LS	
		12	128° 4' 39,21" BT	0° 26' 41,34" LS	
		13	128° 4' 10,58" BT	0° 26' 41,09" LS	
		14	128° 12' 35,36" BT	0° 41' 25,04" LS	
		15	128° 13' 12,10" BT	0° 40' 56,32" LS	
		16	128° 14' 6,92" BT	0° 42' 8,28" LS	
		17	128° 13' 33,50" BT	0° 42' 33,11" LS	
		18	128° 25' 13,94" BT	0° 35' 37,64" LS	
		19	128° 25' 17,41" BT	0° 35' 33,92" LS	
		20	128° 25' 26,15" BT	0° 35' 39,05" LS	
		21	128° 25' 18,44" BT	0° 35' 49,33" LS	
		22	128° 25' 12,18" BT	0° 35' 46,43" LS	

Lampiran 3. Luasan ekosistem penting dimasing-masing zona di Taman Pulau Kecil Kepulauan Widi

ZONA	SUB ZONA	HABITAT	TOTAL LUASAN (Ha)	LUAS HABITAT TERLINDUNGI (Ha)	PERSENTASE (%)
Inti		Terumbu Karang	5913,87	869,02	14,69
		Lamun	298,74	32,60	10,91
		Mangrove	84,61	10,64	12,58
Pemanfaatan terbatas	Pariwisata	Terumbu Karang	5913,87	1.764,82	29,84
		Lamun	298,74	162,81	54,50
		Mangrove	84,61	22,60	26,71
	Perikanan tangkap	Terumbu Karang	5913,87	2.994,00	50,63
		Lamun	298,74	88,78	29,72
		Mangrove	84,61	31,28	36,97

(Sumber: Dhanahisvara & Pingkan, 2019)